



## PEMERINTAH KABUPATEN BONE



### *RENCANA KERJA (RENJA ) 2021*

**KECAMATAN MARE  
KABUPATEN BONE**



**BUPATI BONE PROVINSI  
SULAWESI SELATAN**

**PERATURAN BUPATI BONE  
NOMOR PM TAHUN 2020**

**TENTANG**

**RENCANA KERJA PERANOKAT DAERAH  
KABUPATEN BONE TAHUN 2021**

**DENOAN RAHNAT TUHAN YANG MAHA EBA**

**BUPATT BONE,**

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka penyusunan rencana kerja dan anggaran Perangkat Dacrah Kabupaten Bone Tahun 2021 yang terencana, terarah, terpadu dan berkesinambungan serta memberi pedoman dalam penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Tahun 2021, maka diperlukan Dokumen Rencana Pembangunan Tahunan Daerah Kabupaten Bone Tahun 2021;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu **menctaplan** Peraruran Bupati tentang Rencana Kenja Perangkat Darrah Kabupaten Bone Tahun 2021;

- Mengngat : 1. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang Pembentukan **Dacrah-Dacrah** Tingkat II D Sulawesi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 74, **Tambahun** Lembaran **Negara Republik** Indonesia Nomor 1822);
2. Undang Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembar Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, **Tambahan Lembaran Negara Repubuk** Indoneua Nomor 4286);

3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran **Negara** Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
4. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Penimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
5. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran **Negara** Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587); Sebagaimana telah diubah **beberapa** kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 68 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia nomor 4578);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tatacara **Penyusunan**, **Pengendalian** dan **Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah** (Lembaran **Negara** Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21);

9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah,
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian **Dan Evaluasi** Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan **Jangka Panjang** Daerah, Rencana **Pembangunan Jangka Menengah** Daerah, Dan Rencana Kena Pemenuhan Daerah;
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, Dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan **Keuangan** Daerah [Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1447];
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 40 Tahun 2020 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Kerja Pemerintah daerah Tahun 2021 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor **590**);
13. Peraturan Daerah **Kabupaten Bone Nomor 9** Tahun 2016 tentang Perubahan atas **Peraturan Daerah Kabupaten Bone Nomor 7 Tahun 2008 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Bone** Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Bone Tahun 2016 Nomor 9),
14. Peraturan Daerah Kabupaten Bone Nomor 2 Tahun 2013 tentang **Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Bone 2012-2032** Lembaran **Daerah** Kabupaten Bone Tahun 2013 Nomor 21

15. Peraturan Daerah Kabupaten Bone Nomor 3 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2018-2023 (Lembaran Daerah Kabupaten Bone Tahun 2019 Nomor 3);
16. Peraturan Daerah Kabupaten Bone Nomor 9 Tahun 2019 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Bone Tahun Anggaran 2020 (Lembaran Daerah Kabupaten Bone Tahun 2019 Nomor 9);
17. Peraturan Bupati Bone Nomor 57 Tahun 2019 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Bone Tahun Anggaran 2020 (Lembaran Daerah Kabupaten Bone tahun 2019 Nomor 55);
18. Peraturan Bupati Bone Nomor 28 Tahun 2020 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Bone Tahun 2021 (Berita Daerah Kabupaten Bone Tahun 2020 Nomor 28);

#### MEMUTUSKAN:

Menciptakan PERATURAN BUPATI TENTANG RENCANA KERJA PERANGKAT DAERAH KABUPATEN BONE TAHUN 2021

#### BA I KETENTUAN UNUM

##### Peal 1

Dalam Peraturan Bupati ini, yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Bone.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan perangkat Daerah sebagai unsur Penyelenggara Pemerintahan Daerah.
3. Bupati adalah Bupati Bone.
4. Dewan Perwakilan Rakyat daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah lembaga perwakilan rakyat Daerah yang berkedudukan sebagai unsur Penyelenggara Pemerintahan Daerah.
5. Badan Perencanaan Pembangunan Daerah yang selanjutnya disingkat dengan BAPPEDA adalah Perangkat Daerah yang melaksanakan tugas dan mengkoordinasikan penyusunan,

- perencanaan, dan evaluasi pelaksanaan rencana pembangunan Daerah
6. Perencanaan pembangunan adalah suatu proses untuk menentukan kembalikan masa depan, melalui urutan pilihan yang melibatkan berbagai unsur pemangku kepentingan, **guna pemanfaatan dan pengalokasian sumber daya yang ada dalam jangka waktu tertentu di Daerah.**
  7. **Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah** yang selanjutnya disingkat **RPJPD** adalah dokumen perencanaan daerah untuk periode 20 (dua puluh) tahun.
  8. **Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah** yang selanjutnya disingkat **RJMD** adalah dokumen perencanaan daerah untuk periode 5 (lima) tahun terhitung sejak dilantik sampai dengan berakhirnya masa jabatan kepala daerah.
  9. **Rencana Strategis Perangkat Daerah** yang selanjutnya disingkat dengan **Renstra Perangkat Daerah** adalah dokumen perencanaan Perangkat Daerah untuk periode 5 (Lima) tahun.
  10. **Rencana Pembangunan Tahunan Daerah** yang selanjutnya disebut **Rencana Kerja Pemerintah Daerah** yang selanjutnya disingkat **KPD** adalah dokumen perencanaan Daerah untuk periode 1 (satu) tahun.
  11. **Rencana Kerja Perangkat Daerah** yang selanjutnya disingkat **Renju Perangkat Daerah** adalah dokumen perencanaan perangkat Daerah untuk periode 1 (satu) tahun.
  12. **Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah** yang selanjutnya disingkat **APBD** adalah rencana keuangan tahunan Daerah yang ditetapkan dengan Peraturan Daerah.

## **Paragraf 2**

**Renja Perangkat Daerah Tahun 2021** merupakan dokumen perencanaan yang memuat program dan kegiatan yang diperlukan untuk mencapai sasaran pembangunan selama 1 (satu) tahun, dengan berpedoman pada **Renstra Perangkat Daerah**, dan **Hasil Evaluasi Renju Perangkat Daerah** tahun lalu dan hasil evaluasi **Renja Perangkat Daerah** tahun sebelumnya.

## **BAB II**

### **MAKBUD DAN TUJUAN**

#### **Paragraf 3**

Renja Perangkat Daerah Tahun 2021 disusun dengan maksud:

- a. Pedoman bagi Perangkat Daerah dalam Menyusun Rencana Kerja dan Anggaran Perangkat Daerah Tahun 2021;
- b. Pedoman bagi Pemerintah Daerah dalam menyusun Kebijakan Umum Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (KUA) dan Prioritas Plafon Anggaran Sementara (PPAS) Tahun 2021; dan
- c. Pedoman bagi Pemerintah Daerah dalam menyusun Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (RAPBD) Tahun Anggaran 2021.

## **BAB III**

### **SISTEMATIKA PENULISAN**

#### **Paragraf 4**

(1) Renja Perangkat Daerah Tahun 2021 disusun dengan sistematika sebagai berikut:

Bab I : Pendahuluan;

**Bab II** : Hasil Evaluasi Renja Perangkat Daerah tahun lalu;

Bab III : Tujuan dan Sasaran Perangkat Daerah;

Bab IV : Rencana Kerja dan Pendanaan Perangkat Daerah;

**Bab V** : Penutup.

(2) Renja Perangkat Daerah sebagaimana pada ayat (1) terdiri atas

**Lampiran I** : Dinas Pendidikan

**Lampiran II** : Dinas Kesehatan

**Lampiran III** : BLUD Rumah Sakit Umum Daerah

**Lampiran IV** : Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang

**Lampiran V** : Dinas Pengelolaan Sumber Daya Air

**Lampiran VI** : Satuan Polisi Pamong Praju

**Lampiran VII** : Badan Penanggulangan Bencana Daerah

**Lampiran VIII** : Dinas Pemadam Kebakaran

**Lampiran IX** : Dinas Sosial

**Lampiran X** : Dinas Ketenagakerjaan

**Lampiran XI** : Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak

**Lampiran XII** : Dinas Ketahanan Pangan

**Lampiran XIII** : Dinas Lingkungan Hidup

Lampiran XIV	Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan
Lampiran XV	Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil
Lampiran XVI	Dinas Pembedayaan Masyarakat dan Desa
Lampiran XVII	Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana
Lampiran XVIII	Dinas Perhubungan
Lampiran XIX	Dinas Komunikasi, Informatika dan Persandian
Lampiran XX	Dinas Koperasi dan Usaha Kecil Menengah
Lampiran XXI	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan terpadu Satu Pintu
Lampiran XXII	Dinas Kepemudaan dan Olahraga
<b>Lampiran XXIII</b>	<b>Dinas Kesatuan Bangsa dan Politik</b>
Lampiran XXIV	Dinas Kebudayaan
Lampiran XXV	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan
Lampiran XXVI	Dinas Pariwisata
Lampiran XXVII	Dinas Pertanian, Tanaman Pangan, Hortikultura dan Perkebunan
Lampiran XXVIII	Dinas Peternakan
Lampiran XXIX	Dinas Perindustrian
Lampiran XXX	Dinas Perdagangan
Lampiran XXXI	Dinas Kelautan dan Perikanan
<b>Lampiran XXXI</b>	<b>Badan Perencanaan Pembangunan Daerah</b>
Lampiran XXXIII	Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah
<b>Lampiran XXXIV</b>	<b>Badan Pendapatan Daerah</b>
Lampiran XXXV	Badan Kependudukan dan Pengembangan Sumber Daya Manusia
Lampiran XXXVI	Badan Penelitian dan Pengembangan Daerah
Lampiran XXXVII	Inspektorat Daerah
Lampiran XXXVIII	Sekretariat DPRD
Lampiran XXXIX	Sekretariat Daerah
Lampiran XL	Kecamatan Lamuru
Lampiran XLI	Kecamatan Dua Boccoe
Lampiran XLII	Kecamatan Sibulue
Lampiran XLIII	Kecamatan Barebbo
Lampiran XLIV	Kecamatan Cina
Lampiran XLV	Kecamatan Mare
Lampiran XLVI	Kecamatan Awangpone
Lampiran XLVII	<b>Kecamatan Tellu Siattinge</b>
Lampiran XLVIII	Kecamatan Cenrana
Lampiran XLIX	Kecamatan <b>Ajangale</b>
Lampiran L	Kecamatan Amali

Lampiran LI	: Kecamatan <b>Palakka</b>
Lampiran LII	: Kecamatan Uluweng
Lampiran LIII	: Kecamatan Bengo
Lampiran LIV	: Kecamatan Tellu Limpoc
Lampiran LV	: Kecamatan Lappariaja
Lampiran LVI	: <b>Kccamatan Patimpeng</b>
Lampiran LVII	: Kccamatan Ponre
Lampiran LVIII	: Kecarnatan Libureng
Lampiran LIX	: Kecurnatan Bontocan
Lumpran LX	: Kecamatan Kahu
Lampiran LXI	: Kecamatan Kajuar
Lampran LXII	: Kecamatan Tonra
Lampiran LXIII	: Kecamatan Salomckko
Lampiran LXIV	: Kecamatan Tanete <b>Rinttang</b>
Lampiran LXV	: Kecamatan Tanete <b>Riattang</b> Barat
Lampiran LXVI	: Kecamatan Tanete <b>Riattang</b> Timur

#### **Pasal 5**

- (1) Dalam rangka menyusun Rencana Kerja dan Anggaran Perangkat Daerah Tahun 2021, Perangkat Daerah menggunakan Renja Perangkat Daerah Tahun 2021 sebagai rujukan penyusunan program dan kegiatan.
- (2) Perangkat Daerah menggunakan Renja Perangkat Daerah Tahun 2021 dalam melakukan pembahasan Rencana Kerja dan Anggaran Perangkat Daerah dengan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah.

#### **Pasal 6**

Bappeda menelaah kesesuainn antara Renja Perangkat Daerah Tahun 2021 dengan RKPD Tahun 2021.

#### **Psl 7**

Isi beserta uraian Renja Perangkat Daerah Tahun 2021 scbagaimana tercantum dalam Lampiran dan merupakan bagian yang **udak** terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

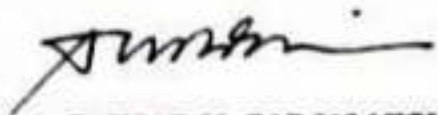
**A IV**  
**PENUTU**  
**Pal 6**

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan Pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Bone

Ditetapkan di Watampone  
pada tanggal 11 April 2020

**UPATIT BONE,**



**A. FAHBAR M. PADJALANGI**

Diundangkan di Watampone  
pada tanggal 11 April 2020

**SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BONE**



**ANDI ISLAMUDDIN**


BERITA DAERAH KABUPATEN BONE TAHUN 2020 NOMOR

## KATA PENGANTAR

Puji syukur kami panjatkan Kehadirat Allah SWT atas limpahan Rahmat dan Taufik serta Hidayahnya sehingga kami dapat menyusun Rencana Kerja (Renja) Kecamatan Mare Tahun 2021, Rencana Kerja ini merupakan wujud dari model Penyelenggaraan Pemerintahan yang baik dan tertuang dalam Rencana Kerja Kecamatan Mare

Rencana Kerja Tahun 2021 merupakan Evaluasi Kinerja Kecamatan Mare di tahun 2019 sampai 2020 serta Program dan kegiatan yang dilaksanakan di Tahun 2021 sehingga diharapkan dapat dijadikan Pedoman bagi Aparatur dalam menentukan Prioritas-Prioritas pekerjaan sesuai tugas pokok dan fungsinya, disisi lain Renja ini juga berisikan Indikator-Indikator kinerja sehingga dapat dijadikan Evaluasi atau tolak ukur kinerja diakhir Tahun yang sangat bermanfaat untuk mengetahui capaian Kinerja Kecamatan Mare dalam mewujudkan visi dan misi Pemerintah Kabupaten Bone.

Demikian Rencana Kerja ini kami susun sebagai acuan dalam pelaksanaan Program dan Kegiatan sehingga menjadi tolak ukur dalam Penyelenggaraan Pemerintahan yang baik di Kecamatan Mare Tahun 2021

Mare, 6 Januari 2021  
CAMAT MARE  
  
A. MUH. AWALUDDIN, S.STP  
NIP. 19800222 199912 1 001

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR

DAFTAR ISI

BAB I PENDAHULUAN.....	1
1.1 Latar Belakang.....	1
1.2 Landasan Hukum.....	2
1.3 Maksud dan Tujuan.....	5
1.4 Sistematika Penulisan.....	6
 BAB II HASIL EVALUASI PELAKSANAAN RENCANA KERJA KECAMATAN TAHUN LALU.....	 8
2.1 Evaluasi Pelaksanaan Renja Kecamatan Tahun Lalu dan Capaian Renstra Kecamatan.....	 8
2.2 Analisis Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah.....	31
2.3 Isu-isu penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah.....	48
2.4 Review Terhadap Rancangan Awal RKPD.....	48
2.5 Penelaahan Usulan Program dan kegiatan Masyarakat.....	73
 BAB III TUJUAN DAN SASARAN PERANGKAT DAERAH.....	 74
3.1 Telaahan terhadap Kebijakan Nasional dan Provinsi.....	74
3.2 Tujuan dan Sasaran Renja SKPD.....	75
3.3 Program dan Kegiatan.....	75
 BAB IV RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH.....	 78
BAB V PENUTUP.....	84

## **BAB I**

### **PENDAHULUAN**

#### **1.1. Latar Belakang**

Rencana Kerja Tahun 2021 Kecamatan Kabupaten Bone merupakan dokumen perencanaan pembangunan Kecamatan, dan pelaksanaan tugas pelayanan publik sebagai tindak lanjut dari perumusan kebijakan strategis dalam rangka peningkatan kesejahteraan masyarakat, menetapkan program dan kegiatan untuk mewujudkan bentuk dan sifat pelayanan yang dicapai pada masa satu tahun.

Penyusunan Rencana Kerja (RENJA) Tahun 2021 Kecamatan dilandasi oleh semangat Otonomi Daerah dimana Pemerintah Daerah berwenang untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan Pemerintah menurut asas Otonomi dan Tugas Pembantuan, hal ini diperkuat dengan pernyataan Undang – undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 Pasal 4 ayat 1, Pemberian Kewenangan Kepala Daerah kepada Camat, dimaksudkan untuk mempercepat proses terwujudnya kesejahteraan masyarakat melalui peningkatan pelayanan, pemberdayaan dan peran serta masyarakat, dengan adanya kewenangan diharapkan pemerintah daerah mampu meningkatkan daya saing melalui prinsip demokrasi, pemerataan dan keadilan dalam pembangunan, serta meningkatkan daya guna potensi Kecamatan dan keanekaragaman sumber daya manusia.

Dalam melaksanakan kewenangan dengan memperhatikan keterkaitan antara Perencanaan Daerah dengan Perencanaan Kecamatan, maka perencanaan tujuan Kecamatan mendukung Perencanaan Pembangunan Daerah, sehingga tujuan maupun sasaran pembangunan yang ingin dicapai Pemerintah Kecamatan bersinergi dengan tujuan maupun sasaran yang ingin dicapai oleh Pemerintah Daerah.

Rencana Kerja (RENJA) Tahun 2021 Kecamatan memuat usulan program dan kegiatan pembangunan sesuai dengan tugas pokok dan fungsi Kecamatan serta kerangka pendanaan daerah, Renja Kecamatan secara substansial sesuai dengan Visi, Misi, agenda Kecamatan dan rencana resmi daerah (RKPD, RPJMD dan Renstra Kecamatan) dengan Renja KIL dan Renja Provinsi/Kabupaten serta tindak lanjutnya dengan proses

Penyusunan RAPBD, sesuai dengan amanat Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004, Perencanaan Pembangunan hams mencakup 5 (lima) pendekatan yaitu:

1. Pendekatan politis, dimana dengan adanya pemilihan Kepala Daerah secara langsung, maka program -- program yang ditawarkan oleh kadindat Kepala Daerah pada saat melakukan kampanye hams dianggap sebagai proses perencanaan pembangunan.
2. Pendekatan teknokratik dimana perencanaan pembangunan hams menggunakan metode dan kerangka berfikir ilmiah.
3. Pendekatan partisipatif yang masyarakat bahwa proses penyusunan perencanaan pembangunan hams melibatkan masyarakat sebagai pihak yang berkepentingan ( Stakeholder ) terhadap pembangunan.
4. Pendekatan Top-Down (Atas-Bawah) yaitu bahwa penyusunan perencanaan pembangunan hams memperhatikan program-program jenjang pemerintah di atasnya.
5. Pendekatan Botom --Up ( Bawah -- Atas ) yaitu penyusunan perencanaan pembangunan hams memperhatikan kepentingan dan kebutuhan Stake holder atau jenjang pemerintah dibawahnya, hasil proses penyusunan rencana pembangunan, Top - Down dan Botom -- Up diselaraskan melalui musyawarah, perencanaan pembangunan atau musrenbang..

Rencana Kerja ( RENJA ) Kecamatan. Tahun 2021 disusun sesuai dengan tugas pokok dan fungsi Kecamatan, mengacu kepada Rancangan **RKPD** Kabupaten Bone Tahun 2021, Renstra Kecamatan hasil evaluasi pelaksanaan program dan kegiatan priode sebelumnya.

## 1.2. Landasan Hukum

Peraturan Perundang-undangan yang menjadi dasar dalam penyusunan Rencana Kerja Kecamatan Kabupaten Bone Tahun 2021 adalah sebagai berikut:

1. Landasan Idiil : Pancasila
2. Landasan Konstitusionil : UUD 1945
3. Landasan Operasional :
  1. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah-daerah tingkat II di Sulawesi;

2. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2003 tentang keuangan Negara;
3. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2004 tentang Pembendaharaan Negara;
4. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan;
5. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan, Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara;
6. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional;
7. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
8. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah;
9. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025;
10. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang;
11. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2019 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah;
12. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup;
13. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2004 tentang Rencana Kerja Pemerintah;
14. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
15. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 65 Tahun 2005 tentang Pedoman Penyusunan dan Penerapan standar pelayanan minimal keuangan daerah;
16. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman pembinaan dan pengawasan penyelenggaraan pemerintah;

17. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 40 Tahun 2006 tentang Tata cara penyusunan rencana pembangunan Nasional;
18. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2007 tentang Laporan penyelenggaraan pemerintah daerah kepada pemerintah, laporan keterangan pertanggung jawaban kepala daerah kepada **DPRD** dan Informasi penyelenggaraan pemerintahan daerah kepada masyarakat;
19. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan pemerintahan antara pemerintah, pemerintah daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota;
20. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2008 tentang Pedoman Evaluasi penyelenggaraan pemerintahan daerah;
21. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, tata cara penyusunan, pengendalian dan evaluasi pelaksanaan rencana pembangunan daerah;
22. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 26 Tahun 2008 tentang rencana tata ruang wilayah Nasional;
23. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2010 tentang rencana pembangunan jangka menengah Nasional Tahun 2010-2014;
24. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan barang jasa pemerintah;
25. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman pengelolaan keuangan daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan peraturan menteri dalam negeri nomor 21 Tahun 2011;
26. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan peraturan pemerintah nomor 8 Tahun 2008 tentang tahapan tata cara penyusunan, pengendalian dan evaluasi pelaksanaan rencana pembangunan daerah;
27. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pedoman penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2015;

28. Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Nomor 2 Tahun 2010 tentang Sistem perencanaan pembangunan daerah;
29. Peraturan Daerah Kabupaten Bone Nomor 08 Tahun 2008 tentang Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) Daerah Kabupaten Bone (Lembaran daerah Kabupaten Bone Tahun 2008 Nomor 8);
30. Peraturan Daerah Kabupaten Bone Nomor 05 Tahun 2008 tentang Pembentukan Organisasi dan tata kerja Kecamatan dan Kelurahan Pemerintahan Kabupaten Bone;
31. Peraturan Daerah Kabupaten Bone Nomor 29 Tahun 2006 tentang Perubahan atas peraturan daerah nomor 7 tahun 2008 tentang Rencana pembangunan jangka panjang daerah Kabupaten Bone tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Bone Tahun 2016 Nomor 9);
32. Peraturan Bupati Bone Nomor 42 Tahun 2012 tentang Petunjuk pelaksanaan Musrenbang yang terintegrasi.

### **1.3 Maksud dan Tujuan**

Rencana Kerja (Renja) Kecamatan Tahun 2021 disusun dengan maksud menyediakan dokumen perencanaan tahunan yang memuat program dan kegiatan pembangunan daerah yang menjadi tolak ukur penilaian kinerja serta sebagai perangkat untuk mencapai harmonisasi perencanaan pembangunan daerah bagi Kecamatan pada Tahun 2021.

Renja Kecamatan Kabupaten Bone Tahun 2021 disusun dengan tujuan sebagai berikut ::

1. Sebagai pedoman bagi Kecamatan dalam menentukan Prioritas program dan kegiatan tahun 2021.
2. Memudahkan seluruh jajaran aparatur Kecamatan dalam menjalankan tugas pokok dan fungsi.
3. Memudahkan seluruh jajaran aparatur Kecamatan untuk memenuhi arah kebijakan dan program serta kegiatan operasional tahun 2021.

## 1.4 Sistematika Penulisan

### Bab I Pendahuluan

#### 1.1 Latar Belakang

Berisi uraian Latar Belakang yang dikemukakan secara ringkas tentang Rencana Kerja Kecamatan, proses penyusunan Rencana Kerja Kecamatan, keterkaitan antara Rencana Kerja Kecamatan dengan dokumen RKPD, Renstra Kecamatan, dengan Rencana Kerja K/Provinsi, serta tindaklanjutnya

#### 1.2 Landasan Hukum

Memuat penjelasan tentang undang-undang, peraturan pemerintah, peraturan daerah, dan ketentuan lainnya yang mengatur tentang SOTK, kewenangan Kecamatan, serta pedoman yang dijadikan acuan dalam penyusunan perencanaan dan penganggaran Kecamatan.

#### 1.3 Maksud dan Tujuan

Memuat penjelasan tentang maksud dan tujuan dari penyusunan Rencana Kerja Kecamatan

#### 1.4 Sistematika Penulisan

Menguraikan pokok bahasan dalam penulisan Rencana Kerja Kecamatan serta susunan garis besar isi dokumen

### Bab II Hasil Evaluasi Pelaksanaan Rencana Kerja Kecamatan Tahun Lalu

Pada bab ini memuat kajian (Review) terhadap hasil evaluasi pelaksanaan Rencana Kerja Kecamatan tahun lalu (tahun  $n-2$ ) dan perkiraan capaian tahun berjalan (tahun  $n-1$ ).

#### 2.1 Evaluasi Pelaksanaan Rencana Kerja Kecamatan tahun lalu dan capaian Renstra Kecamatan

#### 2.2 Analisis Kinerja Pelayanan Kecamatan

#### 2.3 Isu-isu Penting penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Kecamatan

#### 2.4 Reviu terhadap Rancangan Awal RKPD

#### 2.5 Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan masyarakat

### Bab III Tujuan, Sasaran, Program dan Kegiatan

#### 3.1 Telaahan terhadap Kebijakan Nasional

Telaahan terhadap kebijakan nasional dan sebagaimana dimaksud, yaitu penelaah yang menyangkut arahan kebijakan dan prioritas pembangunan nasional dan yang terkait dengan tugas pokok dan fungsi Kecamatan. Deskripsi untuk mengisi sub-sub ini mengacu pada kertas kerja bagian telaahan terhadap kebijakan nasional.

3.2 Tujuan dan Sasaran Renja Kecamatan, Bagian ini berisikan mengenai penjelasan:

- a. Faktor-faktor yang menjadi bahan pertimbangan terhadap rumusan program dan kegiatan.
- b. Uraian garis besar mengenai rekapitulasi program dan kegiatan.
- c. Penjelasan jika rumusan program dan kegiatan tidak sesuai dengan rancangan awal **RKPD**, baik jenis program/ kegiatan, Pagu indikator, maupun kombinasi keduanya.
- d. Tabel rencana program dan kegiatan.

### 3.3 Program dan Kegiatan

Menjelaskan faktor-faktor yang menjadi bahan pertimbangan terhadap perumusan Program dan Kegiatan, uraian garis besar mengenai rekapitulasi program dan kegiatan.

Bab IV Rencana Kerja dan Pendanaan Kecamatan

Bab V Penutup

## **BAB II**

### **HASIL EVALUASI PELAKSANAAN RENCANA KERJA KECAMATAN TAHUN LALU**

#### **2.1 Evaluasi Pelaksanaan Renja Kecamatan Tahun Lalu dan Capaian Renstra Kecamatan**

Evaluasi Pelaksanaan Renja dan Capaian Renstra Kecamatan merupakan dokumen Perencanaan organisasi perangkat daerah untuk periode 1 (satu) tahun yang memuat penjabaran perencanaan tahun dan rencana strategis Kecamatan. Tercapai atau tidaknya atas pelaksanaan kegiatan program yang telah disusun dapat dilihat berdasarkan Laporan Akuntabilitas Kinerja Pemerintah yang merupakan suatu bentuk perwujudan kewajiban untuk mempertanggungjawabkan keberhasilan atau kegagalan pelaksanaan dalam mencapai tujuan-tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan, melalui suatu media pertanggung jawaban yang dilaksanakan secara periodic. Terkait dengan hal tersebut Rencana Kerja Kecamatan menyajikan dasar pengukuran kinerja kegiatan dan pengukuran kinerja sasaran dari hasil yang telah diraih atau dilaksanakan oleh Kecamatan selama tahun 2019 dan tahun berjalan 2020 serta perkiraan target 2021.

Sejalan dengan berjalannya waktu, pelaksanaan Renja Kecamatan 2019 telah terlewati. Berbagai Program dan Kegiatan pembangunan yang dituangkan dalam Renja Tahun 2019 telah dilaksanakan, dan untuk mengetahui hasil yang telah dicapai maka perlu dilakukan evaluasi secara menyeluruh, yang kesemuanya itu tertuang dalam Tabel T-C.29 berikut:

**Tabel T-C.29.**

Rekapitulasi Evaluasi Hasil Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah  
dan Pencapaian Renstra Perangkat Daerah s/d Tahun 2020  
Provinsi Sulawesi Selatan Kabupaten Bone Berdasarkan PMDN-13

KANTOR CAMAT MARE

Kode				Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan	Program (outcomes)/Kegiatan (output)	Target Kinerja Capaian Program (Renstra Perangkat Daerah) Tahun 2023	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d dengan tahun 2019	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Lalu (Tahun 2019)			Target Program dan Kegiatan (Renja Perangkat Daerah) tahun 2020	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d tahun berjalan	
								Target Renja Perangkat Daerah tahun 2019	Realisasi Renja Perangkat Daerah tahun 2019	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d tahun berjalan (Tahun 2020)	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1				2	3	4	5	6	7	8-(7/6)	9	10=(5+7+9)	11=(10/4)
1	20	01		<b>Program Pelayanan Administrasi Perkantoran</b>	<b>Cakupan ketersediaan Pelayanan Administrasi Perkantoran(%)</b>								
1	20	01	02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Rekening Listrik, Telepon/Wifi, Air (Rekening)	36	36	36	36	100%	36	108	30%
1	20	01	07	Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan	Jumlah Tenaga Administrasi yang mendapatkan Jasa Administrasi Keuangan selama setahun (Kali)	60	60	60	60	100%	60	180	30%

1	20	01	15	Penyediaan Bahan Bacaan dan Perundang-Undangan	Jumlah Pembayaran Media yang Menyediakan Bahan Bacaan (Kali)	24	24	24	24	100%	24	72	30%
1	20	01	23	Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi Daerah dan Luar Daerah	Jumlah Kegiatan Rutin Koordinasi dan Konsultasi Pelaksanaan Tupoksi Organisasi yang diikuti (Kegiatan)	120	110	110	110	100%	110	330	40%
1	20	01	24	Pelaksanaan Administrasi Perkantoran	Jumlah Paket Pendukung Pelaksanaan Administrasi Perkantoran (Paket)	84	5	5	5	100%	5	15	0.1%
1	20	02		<b>Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur</b>	<b>Cakupan Realisasi Peningkatan sarana dan prasarana Aparatur (%)</b>								
1	20	02	05	Pengadaan Kendaraan Dinas/Operasional	Jumlah Pengadaan Kendaraan Operasional (Unit)	0	1	1	1	100%	1	3	0%
1	20	02	07	Pengadaan Perlengkapan Gedung Kantor	Jumlah Pengadaan Perlengkapan Gedung Kantor (Paket)	3	1	1	1	100%	1	3	10%
1	20	02	09	Pengadaan Peralatan Gedung Kantor	Jumlah Pengadaan Peralatan Gedung Kantor (Paket)	3	8	8	8	100%	10	26	80%

1	20	02	10	Pengadaan Mebeleur	Jumlah Pengadaan Mebeleur (Paket)	4	7	7	7	100%	10	24	60%
1	20	02	22	Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor	Jumlah Pemeliharaan Gedung Kantor (Kegiatan)	12	1	1	1	100%	1	3	30%
1	20	02	24	Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional	Jumlah Pemeliharaan Kendaraan Dinas/Operasional (Kegiatan)	60	4	4	4	100%	4	12	30%
1	20	03		<b>Program Peningkatan Disiplin Aparatur</b>	<b>Cakupan Realisasi Peningkatan Disiplin Aparatur (%)</b>								
1	20	03	02	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Perlengkapannya	Jumlah Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Perlengkapannya (Pasang)	25	0	0	0	0%	0	0	0%
1	20	03	05	Pengadaan Pakaian Khusus Hari-hari Tertentu	Jumlah Pengadaan Pakaian Khusus Hari-hari Tertentu/pakaian batik (Pasang)	30	0	0	0	0%	0	0	0%
1	20	06		<b>Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan</b>	<b>Cakupan Realisasi Penyusunan Dokumen Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan (%)</b>								

1	20	06	01	Penyusunan Laporan Capaian Kinerja Dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian kinerja Dan Ikhtisar Realisasi Kinerja Kecamatan yang tersusun (Laporan)	0	0	0	0	0%	0	0	0%
1	20	08		<b>Program Penunjang Pemerintahan Umum</b>	<b>Cakupan Realisasi Kegiatan Penunjang Pemerintahan Umum (%)</b>								
1	20	08	01	Penyusunan Rencana Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan dan Penganggaran Kecamatan Yang Tersusun (Dokumen)	6	5	5	5	100%	7	17	20%
1	20	19		<b>Program Pembinaan dan Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa</b>	<b>Cakupan Peningkatan Pembinaan dan Fasilitasi Pengelolaan Dana Desa (%)</b>								
1	20	19	01	Evaluasi Rancangan Peraturan Desa tentang APBDes	Jumlah Evaluasi Rancangan Peraturan Desa Tentang APBDes (Laporan)	17	0	0	0	100%	12	12	0%
1	20	19	06	Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan (ADD, TPA,PD & Penyisihan PBB)	Jumlah Laporan Hasil monitoring dan Evaluasi Pengelolaan Dana Desa (Laporan)	17	12	12	12	100%	12	36	20%

1	20	20		<b>Program Peningkatan Sistem Pengawasan Internal dan Pengendalian Pelaksanaan Kebijakan (KDIH)</b>	<b>Persentase Peningkatan Sistem Pengawasan Internal Kecamatan (%)</b>								
1	20	20	07	Koordinasi Pengawasan yang lebih Komprehensif	Jumlah Operasional Pengawasan Tripika (Kali)	36	36	36	36	100%	36	108	30%
1	20	31		<b>Program Peningkatan Kualitas Penyelenggaraan Pemerintahan Desa/Kelurahan</b>	<b>Cakupan Peningkatan Kualitas Penyelenggaraan Pemerintah Desa/Kelurahan (%)</b>								
1	20	31	01	Pembinaan dan Evaluasi Pelaksanaan Pemerintahan Kecamatan dan Kelurahan	Jumlah Dokumen Evaluasi Pelaksanaan FKKS dan TKSK (Dokumen)	3	2	2	2	100%	2	6	20%
1	20	31	32	Peningkatan Operasional Kelurahan Padaelo	Jumlah Peningkatan Operasional Kelurahan Padaelo (Paket)	12	2	2	2	100%	2	6	5%
1	20	31	33	Peningkatan Operasional Kelurahan Padaelo	Jumlah Peningkatan Operasional Kelurahan Padaelo (Paket)	2	2	2	2	100%	2	6	30%

1	20	80		Program Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	Persentase Program Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan Padaelo								
1	20	80	647	Pengadaan,Pembangunan ,Pengembangan danPemeliharaan sarana danprasarana lingkungan pemukiman Jaringan Air Minum Kelurahan Padaelo	Jumlah Pengadaan, Pembangunan, Pengembangan dan Pemeliharaan sarana dan prasarana lingkungan pemukiman Jaringan Air Minum Kelurahan Padaelo (Kegiatan)	1	1	1	1	100%	1	3	30%
1	20	80	648	Pengadaan, Pembangunan, Pengembangan danPemeliharaan sarana dan prasarana Prasarana Pemukiman Drainase dan Selokan Kelurahan Padaelo	Jumlah Pengadaan, Pembangunan, Pengembangan dan Pemeliharaan sarana danprasarana Prasarana Pemukiman Drainase dan Selokan Kelurahan Padaelo ( Kegiatan)	1	5	5	5	100%	5	15	15%
1	20	80	470	Pengadaan, Pembangunan, Pengembangan dan Pemeliharaan sarana dan prasarana Lingkungan Pemukiman Sarana pengumpulan sampah dan sarana pengolahan sampah kelurahan padaelo	Jumlah Pengadaan, Pembangunan, Pengembangan dan Pemeliharaan sarana dan prasarana Lingkungan Pemukiman Sarana pengumpulan sampah dan sarana pengolahan sampah kelurahan padaelo (Kegiatan)	1	5	5	5	100%	5	15	15%

1	20	80	651	Pengadaan, Pembangunan, Pengembangan dan Pemeliharaan sarana dan prasarana Lingkungan Permukiman jaringan pengelolaan Air limbah Domestik skala pemukiman Kelurahan Padaelo	Jumlah Pengadaan, Pembangunan, Pengembangan dan Pemeliharaan sarana dan prasarana Lingkungan Permukiman jaringan pengelolaan Air limbah Domestik skala pemukiman Kelurahan Padaelo. (Kegiatan)	1	1	1	1	100%	1	3	30%
1	20	80	654	Pengadaan, Pembangunan, Pengembangan dan Pemeliharaan sarana dan prasarana Lingkungan Permukiman Penerangan Lingkungan pemukiman dan/ atau Kelurahan Padaelo	Pengadaan, Pembangunan, Pengembangan dan Pemeliharaan sarana dan prasarana Lingkungan Permukiman Penerangan Lingkungan pemukiman dan/ atau Kelurahan Padaelo (Kegiatan)	0	1	1	1	100%	1	3	30%
1	20	80	655	Pengadaan, Pembangunan, Pengembangan dan Pemeliharaan sarana dan prasarana Lingkungan Permukiman Lainnya Kelurahan Padaelo	Jumlah Pengadaan, Pembangunan, Pengembangan dan Pemeliharaan sarana dan prasarana Lingkungan Permukiman Lainnya Kelurahan Padaelo (Kegiatan)	1	1	1	1	100%	1	3	30%

1	20	80	656	Pengadaan, Pembangunan, Pengembangan dan Pemeliharaan sarana dan prasarana Transportasi Jalan Pemukiman, Kelurahan, Padaelo	Jumlah Pengadaan, Pembangunan, Pengembangan dan Pemeliharaan sarana dan prasarana Transportasi Jalan Pemukiman, Kelurahan, Padaelo	0	0	0	0%	0	0	0%
1	20	80	659	Pengadaan, Pembangunan, Pengembangan dan Pemeliharaan sarana dan prasarana Kesehatan; dan/atau mandi, Cuci, kakus untuk Umum/Komunal Kelurahan, Padaelo	Pengadaan, Pembangunan, Pengembangan dan Pemeliharaan sarana dan prasarana Kesehatan; dan/atau mandi, Cuci, kakus untuk Umum/Komunal Kelurahan, Padaelo (Kegiatan)	0	0	0	0%	0	0	0%
1	20	80	659	Pengadaan, Pembangunan, Pengembangan dan Pemeliharaan sarana dan prasarana Pendidikan dan Kebudayaan Bangunan, Pendidikan Anak Usia Dini Kelurahan Padaelo	Jumlah Pengadaan, Pembangunan, Pengembangan dan Pemeliharaan sarana dan prasarana Pendidikan dan Kebudayaan Bangunan Pendidikan Anak Usia Dini Kelurahan Padaelo (Kegiatan)	0	0	0	0%	0	0	0%

1	20	80	491	Pengadaan, Pembangunan, Pengembangan dan Pemeliharaan sarana dan prasarana Pendidikan dan Kebudayaan Wahana Permainan Anak di Pendidikan Usia Dini dan atau Kelurahan Padaelo	Jumlah Pengadaan, Pembangunan, Pengembangan dan Pemeliharaan sarana dan prasarana Pendidikan dan Kebudayaan Wahana Permainan Anak di Pendidikan Usia Dini dan atau Kelurahan Padaelo (Kegiatan)	0	0	0	0	0%	0	0	0%
1	20	81		<b>PROGRAM PEMB ERDAYAAN MASY ARAKAT DI KELURAHAN</b>	<b>Persentase Program Pemberday aan Masyarakat di Kelurahan (%)</b>								
1	20	81	647	Pengelolaan Kegiatan pelayanan kesehatan masyarakat; Pelayanan perilaku hidup bersih dan sehat kel Padaelo	Jumlah Pengelolaan Kegiatan pelayanan kesehatan masyarakat; Pelayanan perilaku hidup bersih dan sehat kelurahan Padaelo (Kegiatan)	1	0	0	0	0%	0	0	0%
1	20	81	458	Pengelolaan Kegiatan Pelayanan Kesehatan Masyarakat; Keluarga Berencana Kelurahan Padaelo	Jumlah Pengelolaan Kegiatan Pelayanan Kesehatan Masyarakat; Keluarga Berencana Kelurahan Padaelo (Kegiatan)	1	0	0	0	0%	0	0	0%

1	20	81	459	Pengelolaan Kegiatan Pelayanan Kesehatan Masyarakat Pelatihan Kader Kesehatan Masyarakat Kelurahan padaelo	Jumlah Pengelolaan Kegiatan Pelayanan Kesehatan Masyarakat Pelatihan Kader Kesehatan Masyarakat Kelurahan Padaelo (Kegiatan)	1	1	1	1	100%	1	3	30%
1	20	81	461	Pengelolaan Kegiatan Pelayanan Pendidikan dan Kebudayaan, Penyelenggaraan Pelatihan Kerja Kelurahan Padaelo	Jumlah Pengelolaan Kegiatan Pelayanan Pendidikan dan Kebudayaan, Penyelenggaraan Pelatihan Kerja Kelurahan Padaelo (Kegiatan)	1	0	0	0	0%	0	0	0%
1	20	81	462	Pengelolaan Kegiatan Pengembangan Usaha Mikro, Kecil dan Menengah, Penyelenggaraan Pelatihan Usaha Kelurahan Padaelo	Jumlah Pengelolaan Kegiatan Pengembangan Usaha Mikro, Kecil dan Menengah Penyelenggaraan Pelatihan Usaha Kelurahan Padaelo (Kegiatan)	1	0	0	0	0%	0	0	0%
1	20	81	463	Pengelolaan Kegiatan Ketentraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat; dan / atau Kegiatan pengelolaan ketentraman, ketertiban umum dan perlindungan Masyarakat lainnya Kelurahan Padaelo	Jumlah Pengelolaan Kegiatan Ketentraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat; dan / atau Kegiatan pengelolaan ketentraman, ketertiban umum dan perlindungan Masyarakat lainnya Kelurahan Padaelo (Kegiatan)	1	0	0	0	0%	0	0	0%

Tabel T-C.29.

Rekapitulasi Evaluasi Hasil Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah dan  
Pencapaian Renstra Perangkat Daerah s/d Tahun 2020 Berdasarkan Permendagri 90  
Provinsi Sulawesi Selatan Kabupaten Bone

Nama Perangkat Daerah: KECAMATAN MARE

PERMENDAGRI 90

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcomes) /Kegiatan (output)	Target Kinerja Capaian Program (Renstra Perangkat Daerah) Tahun 2023	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d dengan tahun 2019	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Lalu (Tahun 2019)			Target program dan kegiatan (Renja Perangkat Daerah) Tahun 2020	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d tahun berjalan	
					Target Renja Perangkat Daerah tahun 2019	Realisasi Renja Perangkat Daerah tahun 2019	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d tahun berjalan (Tahun 2020)	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1	2	3	4	5	6	7	8-(7/6)	9	10=( 5+7+9)	11=(10/4)
7	UNSURKE WILAYAHAN									
7 01	KECAMATAN									
7 01 01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Cakupan Realisasi Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (%)								

7	01	01	2	01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Realisasi Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah														
7	01	01	2	01	01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Kinerja Perangkat Daerah yang Tersusun (Dokumen)	2	3	3	3	100%	2	8	40%					
7	01	01	2	01	02	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Jumlah Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD yang Tersusun (Dokumen)	1	1	1	1	100%	1	3	30%					
7	01	01	2	01	03	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Jumlah Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD yang Tersusun (Dokumen)	4	0	0	0	0%	0	0	0%					
7	01	01	2	01	06	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Dokumen Pelaporan Capaian Kinerja Yang Tersusun dan dilaporkan sesuai kewajiban perangkat daerah (Dokumen)	2	0	0	0	0%	0	0	0%					
7	01	01	2	01	07	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah yang Tersusun (Dokumen)	1	0	0	0	0%	0	0	0%					
7	01	01	2	02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Jumlah Administrasi Keuangan Perangkat Daerah														

7	01	01	2	02	01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	12	12	12	12	100 %	12	36	30 %
7	01	01	2	05		<b>Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah</b>	<b>Jumlah Kegiatan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah</b>								
7	01	01	2	05	01	Peningkatan Sarana dan Prasarana Disiplin Pegawai	Persentase Peningkatan Sarana dan Prasarana Disiplin Pegawai (Pasang)	2	2	2	2	0 %	2	6	30 %
7	01	01	2	05	02	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya (Pasang)	40	40	40	40	0 %	40	120	30 %
7	01	01	2	06		<b>Administrasi Umum Perangkat Daerah</b>	<b>Jumlah Administrasi Umum Perangkat Daerah yang Terlaksana</b>								
7	01	01	2	06	02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Penyediaan Alat Tulis Kantor (ATK) penunjang administrasi perkantoran sesuai rencana kebutuhan (Paket)	1	1	1	1	100 %	1	3	30 %

7	01	01	2	06	04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Penyediaan Logistik Kantor (Paket)	1	1	1	1	100%	1	3	30%
7	01	01	2	06	05	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Paket Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan (Paket)	1	1	1	1	100%	1	3	30%
7	01	01	2	06	06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Pembayaran Media yang menyediakan Bahan Bacaan (Bulan)	12	12	12	12	100%	12	36	30%
7	01	01	2	06	09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Kegiatan Rutin Koordinasi dan Konsultasi Pelaksanaan Tupoksi Organisasi yang di ikuti (Kegiatan)	250	110	110	110	100%	110	330	13%
7	01	01	2	07		<b>Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah</b>	<b>Jumlah Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah</b>								
7	01	01	2	07	02	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan (Unit)	1	0	0	0	0%	0	0	0%

7	01	01	2	07	05	Pengadaan Mebel	Jumlah Pengadaan Mebel (Paket)	4	0	0	0	0%	1	1	0,2%
7	01	01	2	07	06	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya (Paket)	5	0	0	0	0%	5	5	1%
7	01	01	2	07		Pengadaan sarana dan prasarana gedung Kantor dan bangunan Lainnya	Jumlah Pengadaan sarana dan prasarana gedung Kantor dan bangunan Lainnya	2	0	0	0	0%	0	0	0%
7	01	01	2	07		Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau bangunan Lainnya	Jumlah Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau bangunan Lainnya	3	0	0	0	0%	0	0	0%
7	01	01	2	08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah								
7	01	01	2	08	02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Rekening Listrik, Wifi dan Air yang Terbayarkan (Rekening)	36	36	36	36	100%	36	108	30%

7	01	01	2	08	04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Tenaga Administrasi yang Mendapatkan Jasa Pelayanan Umum Kantor Selama Setahun. (Kali)	144	144	144	144	100 %	144	432	40 %
7	01	01	2	09		<b>Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>	<b>Jumlah Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>								
7	01	01	2	09	01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Pemeliharaan Kendaraan Dinas Operasional (Unit)	36	36	36	36	100 %	36	108	30 %
7	01	01	2	09	09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor Dan Bangunan Lainnya (Paket)	12	12	12	12	100 %	12	36	30 %
7	01	01	2	09		Pemeliharaan Peralatan dan Mesin lainnya	Jumlah Pemeliharaan Peralatan dan Mesin lainnya	7	0	0	0	0 %	0	0	0 %

7	01	02			<b>PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK</b>	<b>Cakupan Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik (%)</b>									
7	01	02	2	01	<i><b>Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan diTingkat Kecamatan</b></i>	<i><b>Jumlah Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan diTingkat Kecamatan</b></i>									
7	01	02	2	01	01	Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait	Jumlah Kegiatan Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait (Kegiatan)	1	1	1	1	100%	1	3	30%
7	01	03			<b>PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN</b>	<b>Cakupan Pelaksanaan Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan (%)</b>									

7	01	03	2	01		<b>Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa</b>	<b>Jumlah Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa</b>								
7	01	03	2	01	03	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Jumlah Dokumen Evaluasi Pelaksanaan FKKS dan TKSK (Dokumen)	3	3	3	3	100%	3	9	30%
7	01	03	2	02		<b>Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan</b>	<b>Jumlah Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan yang Terlaksana</b>								
7	01	03	2	02	02	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	Jumlah Pembangunan Sarana dan Prasarana diKelurahan (Kegiatan)	2	2	2	2	100%	2	6	30%
7	01	03	2	02	03	Pemberdayaan Masyarakat diKelurahan	Jumlah Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan (Kegiatan)	4	4	4	4	100%	4	12	30%
7	01	04				<b>PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM</b>	<b>Cakupan Pelaksanaan Koordinasi Ketentraman dan Ketertiban Umum (%)</b>								
7	01	04	2	01		<b>Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum</b>	<b>Jumlah Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum</b>								

7	01	04	2	01	01	Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	Jumlah Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan (Kali)	36	36	36	36	100%	36	108	30%
7	01	06				<b>PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA</b>	<b>Cakupan Pelaksanaan Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa (%)</b>								
7	01	06	2	01		<i>Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa</i>	<i>Jumlah Realisasi Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa</i>								
7	01	06	2	01	01	Fasilitasi Penyusunan Peraturan Desa dan Peraturan Kepala Desa	Jumlah Realisasi Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	17	0	0	0	0%	0	0	0%
7	01	06	2	01	17	Koordinasi Pendampingan Desa di Wilayahnya	Jumlah Laporan Hasil Monitoring dan Evaluasi Pengelolaan Dana Desa (Laporan)	17	17	17	17	100%	17	51	30%

## 2.2 Analisis Kinerja Pelayanan Kecamatan

Pengukuran Kinerja kegiatan dan pengukuran kinerja sasaran dilakukan melalui Penetapan indikator kinerja yaitu ukuran kuantitatif dan kualitatif yang menggambarkan tingkat pencapaian suatu kegiatan yang telah ditetapkan, indikator kegiatan meliputi indikator masukan (Input), keluaran output), hasil (outcome), manfaat (benefits) dan dampak (impacts). Indikator indikator tersebut dapat berupa dana, sumber daya manusia, laporan dan indikator lainnya. Penetapan indikator ini diikuti dengan penetapan besaran indikator kinerja untuk masing-masing jenis indikator yang telah ditetapkan.

Selanjutnya dilakukan Analisis Capaian Kinerja atas sasaran yang didasarkan atas hasil pengukuran kinerja kegiatan dalam suatu sasaran dilakukan analisis pencapaian kinerja atas sasaran tersebut. Pengukuran kinerja dilakukan dengan menggunakan indikator kinerja utama, pengukuran ini dilakukan dengan memanfaatkan kinerja.

Kecamatan sebagai salah satu perangkat daerah yang dalam pelaksanaan tugasnya tidak saja berurusan dengan aspek pemerintahan, pembangunan, kemasyarakatan dan administrasi pemerintah kecamatan semata melainkan juga merupakan ujung tombak pelayanan masyarakat ditingkat kecamatan. Oleh karenanya capaian kinerja pelayanannya lebih banyak dianalisis dari sudut pandang tugas pokok dan fungsi kecamatan dan juga indikator kinerja output yang dihasilkan dari program dan kegiatan yang telah dilaksanakan.

Berikut pencapaian kinerja pelayanan perangkat daerah Kecamatan yang dijabarkan ke dalam Tabel T-C.30 berikut:

Tabel T-C.30.

Pencapaian Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah Kantor Camat  
Provinsi Sulawesi Selatan Kabupaten Bone Berdasarkan PMDN-13.

No	Indikator	SPM/ Standar Nasional	IKK	Target Renstra Perangkat Daerah				Realisasi Capaian		Proyeksi		Catatan Analisis
				Tahun 2019	Tahun 2020	Tahun 2021	Tahun 2022	Tahun 2019	Tahun 2020	Tahun 2021	Tahun 2022	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
1	Jumlah Rekening Listrik, Telepon/Wifi, Air, (Rekening)			36	36	36	36	36	36	36	36	
2	Jumlah Tenaga Administrasi yang mendapatkan Jasa Administrasi Keuangan selama setahun (Kali)			60	60	60	60	60	60	60	60	
3	Jumlah Pembayaran Media yang Menyediakan Bahan Bacaan (Bulan)			12	12	12	12	12	12	12	12	
4	Jumlah Kegiatan Rutin Koordinasi dan Konsultasi Pelaksanaan Tupoksi Organisasi yang diikuti (Kegiatan)			110	110	115	120	110	110	115	120	
5	Jumlah Paket Pendukung Pelaksanaan Administrasi Perkantoran (Paket)			84	84	84	84	84	84	84	84	
	Cakupan Realisasi Peningkatan sarana dan prasarana Aparatur (%)											
6	Jumlah Pengadaan Kendaraan Operasional (Unit)			0	1	0	0	0	1	0	0	

7	Jumlah Pengadaan Perlengkapan Gedung Kantor (Paket)		1	2	3	3	1	2	3	3
8	Jumlah Pengadaan Peralatan Gedung Kantor (Paket)		2	2	3	3	2	2	3	3
9	Jumlah Pengadaan Mebelur (Paket)		4	4	4	4	4	4	4	4
10	Jumlah Pemeliharaan Gedung Kantor (Kegiatan)		1	1	1	1	1	1	1	1
11	Jumlah Pemeliharaan Kendaraan Dinas/Operasional (Kegiatan)		36	48	60	60	36	48	60	60
	<b>Cakupan Realisasi Peningkatan Disiplin Aparatur (%)</b>									
12	Jumlah Pengadaan Pakain Dinas Beserta Perlengkapannya (Pasang)		25	25	25	25	25	25	25	25
13	Jumlah Pengadaan Pakain Khusus Hari-hari Tertentu, pakaian Batik (Pasang)		30	30	30	30	30	30	30	30
	<b>Cakupan Realisasi Penyusunan Dokumen Laporan Capaian Kinerja dan Keuangan (%)</b>									
14	Jumlah Laporan Capaian kinerja Dan Ikhtisar Realisasi Kinerja Kecamatan yang tersusun (Laporan)		0	0	7	6	0	0	7	6
	<b>Cakupan Realisasi Kegiatan Penunjang Pemerintahan Umum (%)</b>									

15	Jumlah Dokumen Perencanaan dan Penganggaran Kecamatan Yang Tersusun (Dokumen)		7	7	6	7	7	7	6	7
	<b>Cakupan Peningkatan Pembinaan dan Fasilitasi Pengelolaan Dana Desa (%)</b>									
16	Jumlah Evaluasi Rancangan Peraturan Desa Tentang APBDes (Laporan)		17	17	17	17	17	17	17	17
17	Jumlah Laporan Hasil Monitoring dan Evaluasi Pengelolaan Dana Desa (Laporan)		17	17	1	17	17	17	17	17
	<b>Persentase Peningkatan Sistem Pengawasan Internal Kecamatan (%)</b>									
18	Jumlah Operasional Pengawasan Tripika (Kali)		36	36	36	36	36	36	36	36
	<b>Cakupan Peningkatan Kualitas Penyelenggaraan Pemerintah Desa/Kelurahan (%)</b>									
19	Jumlah Dokumen Evaluasi Pelaksanaan FKKS dan TKSK (Dokumen)		3	3	3	3	3	3	3	3
20	Jumlah Peningkatan Operasional Kelurahan Padaelo (Paket)		12	12	12	12	12	12	12	12

	<b>Persentase Program Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan Padaelo</b>											
22	Jumlah Pengadaan, Pembangunan, Pengembangan, dan Pemeliharaan sarana dan prasarana lingkungan pemukiman Jaringan Air minum Kelurahan Padaelo (Kegiatan)			0	0	0	0	0	0	0	0	0
23	Jumlah Pengadaan, Pembangunan, Pengembangan dan Pemeliharaan sarana dan prasarana Lingkungan Pemukiman Drainase dan Selokan Kelurahan Padaelo (Kegiatan)			1	1	1	1	1	1	1	5	
24	Jumlah Pengadaan, Pembangunan, Pengembangan dan Pemeliharaan sarana dan prasarana Lingkungan Permukiman sarana pengumpulan sampah dan sarana pengolahan sampah kelurahan padaelo (Kegiatan)			1	1	1	1	1	1	1	1	

[illegible]

28	Jumlah Pengadaan, Pembangunan, Pengembangan, dan Pemeliharaan sarana dan prasarana Transportasi Saran dan Kesehatan dan/atau Mandi, cuci, kakus untuk umum/Komunal Kelurahan Padaelo (Kegiatan)			0	0	1	1	0	0	1	1	
30	Jumlah Pengadaan, Pembangunan, Pengembangan dan Pemeliharaan sarana dan prasarana Pendidikan dan Kebudayaan Bangunan Pendidikan Anak Usia Dini Kelurahan Padaelo (Kegiatan)			0	0	1	1	0	0	1	1	
31	Jumlah Pengadaan, Pembangunan, Pengembangan dan Pemeliharaan sarana dan prasarana Pendidikan dan Kebudayaan Wahana Permainan Anak di Pendidikan Usia Dini dan atau Kelurahan Padaelo (Kegiatan)			0	0	0	1	0	0	0	1	
	<b>Persentase Program Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan (%)</b>											
35	Jumlah Pengelolaan Kegiatan Pelayanan Kesehatan Masyarakat, Pelayanan Perilaku Hidup Bersih dan sehat Kelurahan Padaelo (Kegiatan)			1	1	1	1	1	1	1	1	

36	Jumlah Pengelolaan Kegiatan Pelayanan Kesehatan Masyarakat; Keluarga Berencana Kelurahan Padaelo (Kegiatan)		0	0	0	1	0	0	0	1	
37	Jumlah Pengelolaan Kegiatan Pelayanan Kesehatan Masyarakat Pelatihan Kader Kesehatan Masyarakat Kelurahan Padaelo (Kegiatan)		0	0	1	1	0	0	1	1	
38	Jumlah Pengelolaan Kegiatan Pelayanan Pendidikan dan Kebudayaan; Penyelenggaraan Pelatihan Kerja Kelurahan Padaelo (Kegiatan)		0	0	1	1	0	0	1	1	
43	Jumlah Pengelolaan Kegiatan Ketentraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat; dan / atau Kegiatan pengelolaan Ketentraman, ketertiban umum dan perlindungan masyarakat lainnya Kelurahan Padaelo (Kegiatan)		0	0	0	0	0	0	0	0	

1 Tabel T-C.30.

Pencapaian Kinerja, Pelayanan, Perangkat Daerah Kantor Camat Provinsi  
Sulawesi Selatan Kabupaten Bone

PERMENDAGRI 90

No	Indikator	SPM/ Standar Nasional	IKK	Target Renstra Perangkat Daerah				Realisasi Capaian		Proyeksi		Catatan Analisis
				Tahun2019	Tahun2020	Tahun2021	Tahun2022	Tahun2019	Tahun2020	Tahun2021	Tahun2022	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
<b>Jumlah Realisasi Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah</b>												
1	Jumlah Dokumen Perencanaan Kinerja Perangkat Daerah yang Tersusun (Dokumen).			3	2	2	2	3	2	2	2	
2	Jumlah Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD yang Tersusun (Dokumen)			1	1	2	1	1	1	2	1	
3	Jumlah Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD yang Tersusun (Dokumen).			0	0	0	1	0	0	0	1	

4	Jumlah Dokumen Pelaporan Capaian Kinerja Yang Tersusun, dan dilaporkan sesuai kewajiban perangkat daerah (Dokumen)			0	0	0	1	0	0	0	1	
5	Jumlah Dokumen Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah yang tersusun (Dokumen)			0	0	1	1	0	0	1	1	
<b>Jumlah Administrasi Keuangan Perangkat Daerah</b>												
6	Jumlah Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN			12	12	12	12	12	12	12	12	
<b>Jumlah Kegiatan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah</b>												
7	Persentase Peningkatan Sarana dan Prasarana Disiplin Pegawai (Pasang)			0	0	20	20	0	0	20	20	

8	Jumlah Pengadaan Pakaian Dinas.Beserta Atribut Kelengkapannya (Pasang)		40	40	40	40	40	40	40	
<b>Jumlah Administrasi Umum Perangkat Daerah yang Terlaksana</b>										
9	Jumlah Paket Penyediaan Alat Tulis Kantor (ATK) penunjang administrasi perkantoran sesuai rencana kebutuhan (Paket)		1	1	1	1	1	1	1	
10	Jumlah Paket Penyediaan Logistik Kantor (Paket)		1	1	1	1	1	1	1	
11	Jumlah Paket Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan (Paket)		1	1	1	1	1	1	1	
12	Jumlah Pembayaran Media yang menyediakan Bahan Bacaan (Bulan)		12	12	12	12	12	12	12	

13	Jumlah Kegiatan Rutin Koordinasi dan Konsultasi Pelaksanaan, Tupoksi Organisasi yang di ikuti (Kegiatan)		110	110	110	825	110	110	110	825	
<b>Jumlah Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah</b>											
14	Jumlah Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan (Unit)		0	0	1	1	0	0	1	1	
15	Jumlah Pengadaan Mebel (Paket)		0	1	4	4	0	1	4	4	
16	Jumlah Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya (Paket)		5	5	5	5	5	5	5	5	
17	Jumlah Pengadaan sarana dan prasarana Gedung kantor dan bangunan lainnya		0	0	0	2	0	0	0	2	
18	Jumlah Pengadaan sarana dan prasarana pendukung Gedung kantor atau bangunan lainnya		0	0	0	3	0	0	0	3	

	<b>Jumlah Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>										
19.	Jumlah Rekening Listrik, Wifi dan Air yang Terbayarkan (Rekening)			36	36	36	36	36	36	36	36
20.	Jumlah Tenaga Administrasi yang Mendapatkan Jasa Pelayanan Umum Kantor Selama Setahun (Kali)			144	144	144	144	144	144	144	144
	<b>Jumlah Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>										
21.	Jumlah Pemeliharaan Kendaraan Dinas Operasional (Unit)			36	36	36	36	36	36	36	36
22.	Jumlah Gedung Kantor Dan Bangunan Lainnya (Paket)			12	12	12	12	12	12	12	12

23	Jumlah Pemeliharaan Peralatan dan Mesin lainnya (Unit)			0	0	7	7	0	0	7	7
<b>Jumlah Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan</b>											
24	Jumlah Kegiatan Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait (Kegiatan)			1	1	1	1	1	1	1	1
<b>Jumlah Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa</b>											
22	Jumlah Dokumen Evaluasi Pelaksanaan FKKS dan TKSK (Dokumen)			3	3	3	3	3	3	3	3
<b>Jumlah Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan yang Terlaksana</b>											
23	Jumlah Pembangunan Sarana dan Prasarana di Kelurahan (Kegiatan)			2	2	2	2	2	2	2	2

24	Jumlah Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan (Kegiatan)			4	4	4	4	4	4	4	4	
<b>Jumlah Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum</b>												
25	Jumlah Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan (Kati)			36	36	36	36	36	36	36	36	
<b>Jumlah Realisasi Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa</b>												
26	Jumlah Evaluasi Rancangan Peraturan Desa Tentang APB Desa			0	0	0	17	0	0	0	17	
27	Jumlah Laporan Hasil Monitoring dan Evaluasi Pengelolaan Dana Desa (Laporan)			17	17	17	17	17	17	17	17	

### 2.3 Isu-Isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah

Secara umum isu-isu penting strategis yang dihadapi oleh Pemerintah Kecamatan adalah sebagai berikut:

1. Pemanfaatan peluang kebijakan penyerahan sebagian kewenangan dari Camat kepada para Pemangku Jabatan Fungsional di Bidang Pemerintahan untuk mendayagunakan segenap potensi yang ada di kantor Camat.
2. Pelayanan Prima Kecamatan sebagai salah satu SKPD di Pemerintah Kabupaten Bone yang menyelenggarakan pelayanan publik, maka harus benar-benar mampu memberikan pelayanan secara prima kepada masyarakat, yaitu pelayanan cepat, akurat, dan tentunya dengan tetap berdasarkan pada prosedur serta peraturan atau aturan yang berlaku.
3. Peningkatan Kapasitas Aparatur dan penambahan kuantitas aparatur. Keberadaan aparatur merupakan faktor penting dalam rangka penyelenggaraan tugas dan fungsi, serta pemberian pelayanan masyarakat.
4. Optimalisasi partisipasi masyarakat dan kalangan dunia usaha di wilayah Kecamatan harus terus memacu partisipasi masyarakat dan kalangan dunia usaha dalam penyelenggaraan pembangunan, terlebih pada pembangunan peningkatan infrastruktur wilayah guna mendorong pertumbuhan ekonomi masyarakat.

### 2.4 Review Terhadap Rancangan Awal RKPD

Review adalah aktivitas untuk mengevaluasi pelaksanaan kebijakan, program dan kegiatan yang telah ditetapkan. Renja disusun dengan berpedoman kepada Rencana Strategis (Renstra) Kecamatan serta mengacu kepada Rencana Kerja Perangkat Daerah (RKPD) Kabupaten Bone. Sebagai dokumen perencanaan pembangunan dan sesuai dengan amanat Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional, maka RKPD merupakan pedoman bagi penyusunan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (RAPBD), Kebijakan Umum Anggaran (KUA) dan Prioritas Plafon Anggaran Sementara (PPAS).

Guna mencapai target sasaran kinerja kegiatan Kecamatan diperlukan kesungguhan dari pengelola anggaran dalam melaksanakan program dan kegiatan. Dalam rangka

Mewujudkan keseimbangan pelaksanaan program maka pengawasan dan evaluasi harus dilaksanakan secara konsisten sehingga dapat segera dilakukan koreksi terhadap penyimpangan arah pelaksanaan.

- a. Perbandingan rancangan awal RKPD dengan hasil analisa kebutuhan. Dalam RKPD 2019 Kecamatan mengusulkan 9 Program dengan 48 kegiatan.
- b. Penjelasan mengenai temuan dan catatan penting. Program dan kegiatan pada Kecamatan mengacu pada Visi dan Misi Pemerintah Kabupaten Bone. Adapun review terhadap rancangan awal RKPD terkait prioritas program/kegiatan dan pagu indikatif yang disediakan untuk setiap SKPD tertuang dalam table T-C.31 berikut ini:

Tabel T-C.31.


Review terhadap Rancangan Awal RKPD tahun 2021 Berdasarkan PMDN-13  
Provinsi Sulawesi Selatan Kabupaten Bone

Kantor Camat Mare

No.	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
	Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target capaian	Pagu indikatif (Rp.000)	Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator kinerja	Target capaian	Kebutuhan Dana (Rp.000)	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
1	<b>Program Pelayanan Administrasi Perkantoran</b>		<b>Cakupan ketersediaan Pelayanan Administrasi Perkantoran (%)</b>			<b>Program Pelayanan Administrasi Perkantoran</b>		<b>Cakupan ketersediaan Pelayanan Administrasi Perkantoran (%)</b>			
	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Kecamatan	Jumlah Rekening Listrik, Telepon/Wifi Air (Rekening)	36	20.812.000	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Kecamatan	Jumlah Rekening Listrik, Telepon/Wifi Air (Rekening)	36	10.800.000	
	Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan	Kecamatan	Jumlah Tenaga Administrasi yang mendapatkan Jasa Administrasi Keuangan selama setahun (Kali)	60	42.289.500	Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan	Kecamatan	Jumlah Tenaga Administrasi yang mendapatkan Jasa Administrasi Keuangan selama setahun (Kali)	60	32.100.000	
	Penyediaan Bahan Bacaan dan Perundang-Undangan	Kecamatan	Jumlah Pembayaran Media yang Menyediakan Bahan Bacaan (Kali)	24	3.630.000	Penyediaan Bahan Bacaan dan Perundang-Undangan	Kecamatan	Jumlah Pembayaran Media yang Menyediakan Bahan Bacaan (Kali)	24	1.080.000	

	Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi Daerah dan Luar Daerah	Kecamatan	Jumlah Kegiatan Rutin Koordinasi dan Konsultasi Pelaksanaan Tupoksi Organisasi yang diikuti (Kegiatan)	115	66.500.000	Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi Daerah dan Luar Daerah	Kecamatan	Jumlah Kegiatan Rutin Koordinasi dan Konsultasi Pelaksanaan Tupoksi Organisasi yang diikuti (Kegiatan)	115	54.000.000
	Pelaksanaan Administrasi Perkantoran	Kecamatan	Jumlah Paket Pendukung Pelaksanaan Administrasi Perkantoran (Paket)	84	96.800.000	Pelaksanaan Administrasi Perkantoran	Kecamatan	Jumlah Paket Pendukung Pelaksanaan Administrasi Perkantoran (Paket)	84	101.360.000
2	<b>Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur</b>		<b>Cakupan Realisasi Peningkatan sarana dan prasarana Aparatur (%)</b>			<b>Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur</b>		<b>Cakupan Realisasi Peningkatan sarana dan prasarana Aparatur (%)</b>		
	Pengadaan Kendaraan Dinas/Operasional	Kecamatan	Jumlah Pengadaan Kendaraan Operasional (Unit)	1	25.000.000	Pengadaan Kendaraan Dinas/Operasional	Kecamatan	Jumlah Pengadaan Kendaraan Operasional (Unit)	0	0
	Pengadaan Perlengkapan Gedung Kantor	Kecamatan	Jumlah Pengadaan Perlengkapan Gedung Kantor (Paket)	3	33.000.000	Pengadaan Perlengkapan Gedung Kantor	Kecamatan	Jumlah Pengadaan Perlengkapan Gedung Kantor (Paket)	3	30.000.000
	Pengadaan Peralatan Gedung Kantor	Kecamatan	Jumlah Pengadaan Peralatan Gedung	3	33.000.000	Pengadaan Peralatan	Kecamatan	Jumlah Pengadaan Peralatan Gedung	3	33.000.000
	Pengadaan Mebelur	Kecamatan	Jumlah Pengadaan Mebelur (Paket)	4	26.620.000	Pengadaan Mebelur	Kecamatan	Jumlah Pengadaan Mebelur (Paket)	4	22.000.000
	Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung	Kecamatan	Jumlah Pemeliharaan Rutin/Berkala (Kegiatan)	12	20.570.000	Pemeliharaan Rutin/Berkala	Kecamatan	Jumlah Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor	12	10.000.000
	Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional	Kecamatan	Jumlah Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional (Kegiatan)	60	85.200.335	Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional	Kecamatan	Jumlah Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional (Kegiatan)	60	82.816.000

3	Program Peningkatan Disiplin Aparatur		Cakupan Realisasi Peningkatan Disiplin Aparatur (%)			Program Peningkatan Disiplin Aparatur		Cakupan Realisasi Peningkatan Disiplin Aparatur (%)		
	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Perlengkapannya	Kecamatan	Jumlah Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Perlengkapannya (Pasang)	25	10.587.500	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Perlengkapannya	Kecamatan	Jumlah Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Perlengkapannya (Pasang)	25	10.000.000
	Pengadaan Pakaian Khusus Hari-hari Tertentu	Kecamatan	Jumlah Pengadaan Pakaian Khusus Hari-hari Tertentu/Pakaian Batik (Pasang)	30	5.445.000	Pengadaan Pakaian Khusus Hari-hari Tertentu	Kecamatan	Jumlah Pengadaan Pakaian Khusus Hari-hari Tertentu/Pakaian Batik (Pasang)	30	5.400.000
5	Program Penunjang Pemerintahan Umum		Cakupan Realisasi Kegiatan Penunjang Pemerintahan Umum (%)			Program Penunjang Pemerintahan Umum		Cakupan Realisasi Kegiatan Penunjang Pemerintahan Umum (%)		
	Penyusunan Rencana Perangkat Daerah	Kecamatan	Jumlah Dokumen Perencanaan dan Penganggaran Kecamatan Yang Tersusun (Dokumen)	7	22.130.900	Penyusunan Rencana Perangkat Daerah	Kecamatan	Jumlah Dokumen Perencanaan dan Penganggaran Kecamatan Yang Tersusun (Dokumen)	7	11.000.000

6	Program Pembinaan dan Fasilitas Pengelolaan Keuangan Desa		Cakupan Peningkatan Pembinaan dan Fasilitas Pengelolaan Dana Desa (%)			Program Pembinaan dan Fasilitas Pengelolaan Keuangan Desa		Cakupan Peningkatan Pembinaan dan Fasilitas Pengelolaan Dana Desa (%)		
	Evaluasi Rancangan Peraturan Desa tentang APBDes	Kecamatan	Jumlah Evaluasi Rancangan Peraturan Desa Tentang APBDes (Laporan)	17	14.520.000	Evaluasi Rancangan Peraturan Desa tentang APBDes	Kecamatan	Jumlah Evaluasi Rancangan Peraturan Desa Tentang APBDes (Laporan)	17	9.000.000
		Kecamatan	Jumlah Laporan Hasil Monitoring dan Evaluasi Pengelolaan Dana Desa (Laporan)	17	6.050.000	Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan (ADD, TPA, PD& Penyisihan PBB)	Kecamatan	Jumlah Laporan Hasil Monitoring dan Evaluasi Pengelolaan Dana Desa (Laporan)	12	6.655.000
7	Program Peningkatan Sistem Pengawasan Internal dan Pengendalian Pelaksanaan Kebijakan (KDH)		Persentase Peningkatan Sistem Pengawasan Internal Kecamatan (%)			Program Peningkatan Sistem Pengawasan Internal dan Pengendalian Pelaksanaan Kebijakan (KDH)		Persentase Peningkatan Sistem Pengawasan Internal Kecamatan (%)		
	Koordinasi Pengawasan yang lebih Komprehensif	Kecamatan	Jumlah Operasional Pengawasan Tripika (Kali)	36	32.670.000	Koordinasi Pengawasan yang lebih Komprehensif	Kecamatan	Jumlah Operasional Pengawasan Tripika (Kali)	36	27.000.000
8	Program Peningkatan Kualitas Penyelenggaraan Pemerintahan Desa/Kelurahan		Cakupan Peningkatan Kualitas Penyelenggaraan Pemerintah Desa/Kelurahan (%)			Program Peningkatan Kualitas Penyelenggaraan Pemerintahan Desa/Kelurahan		Cakupan Peningkatan Kualitas Penyelenggaraan Pemerintah Desa/Kelurahan (%)		

	Pembinaan dan Evaluasi Pelaksanaan Pemerintahan Kecamatan dan Kelurahan	Kecamatan	Jumlah Dokumen Evaluasi Pelaksanaan FKKS dan TKSK (Dokumen)	3	54.450.000	Pembinaan dan Evaluasi Pelaksanaan Pemerintahan Kecamatan dan Kelurahan	Kecamatan	Jumlah Dokumen Evaluasi Pelaksanaan FKKS dan TKSK (Dokumen)	2	54.450.000
	Peningkatan Operasional Kelurahan Padaelo	Kecamatan	Jumlah Peningkatan Operasional Kelurahan Padaelo (Paket)	12	140.360.000	Peningkatan Operasional Kelurahan Padaelo	Kecamatan	Jumlah Peningkatan Operasional Kelurahan Padaelo (Paket)	12	116.000.000
9	Program Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan		Persentase Program Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan Padaelo			Program Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan		Persentase Program Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan Padaelo		
	Pengadaan, Pembangunan, Pengembangan dan Pemeliharaan sarana dan prasarana lingkungan Jaringan Air minum Kelurahan Padaelo	Kecamatan	Pengadaan, Pembangunan, Pengembangan dan Pemeliharaan sarana dan prasarana lingkungan Jaringan Air minum Kelurahan Padaelo (Kegiatan)	0	0	Pengadaan, Pembangunan, Pengembangan dan Pemeliharaan sarana dan prasarana lingkungan pemukiman Drainase dan Selokan Kelurahan Padaelo	Kecamatan	Jumlah Pengadaan, Pembangunan, Pengembangan dan Pemeliharaan sarana dan prasarana lingkungan pemukiman Drainase dan Selokan Kelurahan Padaelo (Kegiatan)	0	0

Pengadaan, Pembangunan, Pengembangan dan Pemeliharaan sarana dan prasarana Lingkungan Permukiman Drainase dan Selokan Kelurahan Padaelo	Jumlah Pengadaan, Pembangunan, Pengembangan dan Pemeliharaan sarana dan prasarana Lingkungan Permukiman Drainase dan Selokan Kelurahan Padaelo (Kegiatan)	↑	124.025.000			↑	112.750.000
Pengadaan, Pembangunan, Pengembangan dan Pemeliharaan sarana dan prasarana Lingkungan Permukiman sarana pengumpulan sampah dan sarana pengolahan sampah kelurahan padaelo	Jumlah Pengadaan, Pembangunan, Pengembangan dan Pemeliharaan sarana dan prasarana Lingkungan Permukiman sarana pengumpulan sampah dan sarana pengolahan sampah kelurahan padaelo (Kegiatan)	↑	25.410.000			↑	22.500.000
Pengadaan, Pembangunan, Pengembangan dan Pemeliharaan sarana dan prasarana Lingkungan Permukiman jaringan pengelolaan air limbah domestik skala pemukiman kelurahan padaelo	Jumlah Pengadaan, Pembangunan, Pengembangan dan Pemeliharaan sarana dan prasarana Lingkungan Permukiman jaringan pengelolaan air limbah domestik skala pemukiman kelurahan padaelo (kegiatan)	0	0				

Pengadaan, Pembangunan, Pengembangan, dan Pemeliharaan sarana dan prasarana lingkungan pemukiman penerangan lingkungan pemukiman dan/atau Kelurahan Padaelo	Kecamatan	Jumlah Pengadaan, Pembangunan, Pengembangan dan Pemeliharaan sarana dan prasarana lingkungan pemukiman penerangan lingkungan pemukiman dan/atau Kelurahan Padaelo (Kegiatan)	I	130.000.000	Pengadaan, Pembangunan, Pengembangan dan Pemeliharaan sarana dan prasarana lingkungan pemukiman penerangan lingkungan pemukiman penerangan lingkungan pemukiman dan/atau Kelurahan Padaelo	Kecamatan	Jumlah Pengadaan, Pembangunan, Pengembangan dan Pemeliharaan sarana dan prasarana lingkungan pemukiman penerangan lingkungan pemukiman dan/atau Kelurahan Padaelo (Kegiatan)	0	0
Pengadaan, Pembangunan, Pengembangan dan Pemeliharaan sarana dan prasarana lingkungan pemukiman sarana prasarana lingkungan pemukiman lainnya Kelurahan padaelo	Kecamatan	Jumlah Pengadaan, Pembangunan, Pengembangan dan Pemeliharaan sarana dan prasarana lingkungan pemukiman sarana prasarana lingkungan pemukiman lainnya Kelurahan padaelo	I	132.000.000	Pengadaan, Pembangunan, Pengembangan dan Pemeliharaan sarana dan prasarana lingkungan pemukiman sarana prasarana lingkungan pemukiman lainnya padaelo	Kecamatan	Jumlah Pengadaan, Pembangunan, Pengembangan dan Pemeliharaan sarana dan prasarana lingkungan pemukiman sarana prasarana lingkungan pemukiman lainnya Kelurahan padaelo (Kegiatan)	0	0
Pengadaan, Pembangunan, Pengembangan dan Pemeliharaan sarana dan prasarana transportasi jalan pemukiman Kelurahan Padaelo	Kecamatan	Jumlah Pengadaan, Pembangunan, Pengembangan dan Pemeliharaan sarana dan prasarana transportasi jalan pemukiman Kelurahan Padaelo (Kegiatan)	I	230.000.000	Pengadaan, Pembangunan, Pengembangan dan Pemeliharaan sarana dan prasarana transportasi jalan pemukiman Kelurahan Padaelo	Kecamatan	Jumlah Pengadaan, Pembangunan, Pengembangan dan Pemeliharaan sarana dan prasarana transportasi jalan pemukiman Kelurahan Padaelo (Kegiatan)	I	200.000.000

Pengadaan, Pembangunan, Pengembangan dan Pemeliharaan sarana dan prasarana Transportasi Saranadan Kesehatan dan/atau M, Kesehatan andi, cuci, kakus untuk Mandi, cuci, umum/KomunalKelurahan Padaelo	Kecamatan	Jumlah: Pengadaan, Pembangunan, Pengembangan dan Pemeliharaan sarana dan prasarana Transportasi Saranadan Kesehatan dan/atau Mandi, cuci, kakus untuk umum/KomunalKelurahan Padaelo (Kegiatan)	1	50.000.000	Pengadaan, Pembangunan, Pengembangan dan Pemeliharaan sarana dan prasarana Transportasi Saranadan Kesehatan dan/atau Mandi, cuci, kakus untuk umum/KomunalKelurahan Padaelo	Kecamatan	Jumlah: Pengadaan, Pembangunan, Pengembangan dan Pemeliharaan sarana dan prasarana Transportasi Saranadan dan/atau Mandi, cuci, kakus untuk umum/KomunalKelurahan Padaelo (Kegiatan)	0	0
Pengadaan, Pembangunan, Pengembangan dan Pemeliharaan sarana dan prasarana Pendidikan dan Kebudayaan Bangunan Pendidikan Anak Usia Dini Kelurahan Padaelo	Kecamatan	Jumlah Pengadaan, Pembangunan, Pengembangan dan Pemeliharaan sarana dan prasarana Pendidikan dan Kebudayaan Bangunan Pendidikan Anak Usia Dini Kelurahan Padaelo	1	50.000.000	Pengadaan, Pembangunan, Pengembangan dan Pemeliharaan sarana dan prasarana Pendidikan dan Kebudayaan Bangunan Pendidikan Anak Usia Dini Kelurahan Padaelo	Kecamatan	Jumlah Pengadaan, Pembangunan, Pengembangan dan Pemeliharaan sarana dan prasarana Pendidikan dan Kebudayaan Bangunan Pendidikan Anak Usia Dini Kelurahan Padaelo	1	50.000.000
Pengadaan, Pembangunan, Pengembangan dan Pemeliharaan sarana dan prasarana Pendidikan dan Kebudayaan Wahana Permainan Anak di Pendidikan Usia Dini dan atau Kelurahan Padaelo	Kecamatan	Jumlah Pengadaan, Pembangunan, Pengembangan dan Pemeliharaan sarana dan prasarana Pendidikan dan Kebudayaan Wahana Permainan Anak di Pendidikan Usia Dini dan atau Kelurahan Padaelo (Kegiatan)	0	0	Pengadaan, Pembangunan, Pengembangan dan Pemeliharaan sarana dan prasarana Pendidikan dan Kebudayaan Wahana Permainan Anak di Pendidikan Usia Dini dan atau Kelurahan Padaelo	Kecamatan	Jumlah Pengadaan, Pembangunan, Pengembangan dan Pemeliharaan sarana dan prasarana Pendidikan dan Kebudayaan Wahana Permainan Anak di Pendidikan Usia Dini dan atau Kelurahan Padaelo (Kegiatan)	0	0

10.	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DIKELURAHAN		Persentase Program Pemberdayaan Masyarakat diKelurahan (%)	0	0	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DIKELURAHAN	Persentase ProgramPemberdaya anMasyarakat diKelurahan(%)	0	0
	Pengelolaan Kegiatan pelayanan kesehatan masyarakat, Pelayanan perilaku hidup bersih dan sehat kelurahan padaelo	Kecamatan	Jumlah Pengelolaan Kegiatan pelayanan kesehatan masyarakat, Pelayanan perilaku hidup bersih dan sehat kelurahan padaelo (Kegiatan)	1	54.450.000	Pengelolaan Kegiatan pelayanan kesehatan masyarakat, Pelayanan perilaku hidup bersih dan sehat kelurahan padaelo	Jumlah Pengelolaan Kegiatan pelayanan kesehatan masyarakat, Pelayanan perilaku hidup bersih dan sehat kelurahan padaelo (Kegiatan)	1	0
	Pengelolaan Kegiatan Masyarakat Keluarga Padaelo	Kecamatan	Jumlah Pengelolaan Kesehatan Keluarga Berencana Kelurahan Padaelo (Kegiatan)	1		Pengelolaan Pelayanan Masyarakat Keluarga Berencana Kelurahan Padaelo	Jumlah Pengelolaan Kesehatan Masyarakat Kelurahan Padaelo (Kegiatan)		
	Pengelolaan Kegiatan Pelayanan Kesehatan Masyarakat Pelatihan Kader Kesehatan Masyarakat Kelurahan Padaelo	Kecamatan	Jumlah Pengelolaan Kegiatan Pelayanan Kesehatan Masyarakat Pelatihan Kader Kesehatan Masyarakat Kelurahan Padaelo	1	25.000.000	Pengelolaan Kegiatan Pelayanan Kesehatan Masyarakat Pelatihan Kader Kesehatan Masyarakat	Jumlah Pengelolaan Kegiatan Pelayanan Kesehatan Masyarakat Pelatihan Kader Kesehatan Masyarakat Kelurahan Padaelo (Kegiatan)	1	20.000.000

<p>pengelolaan Kegiatan Pelayanan Pendidikan dan Kebudayaan; Penyelenggaraan Pelatihan Kerja Kelurahan Padaelo.</p>	<p>Kecamatan</p>	<p>Jumlah Pengelolaan Kegiatan Pelayanan Pendidikan dan Kebudayaan; Penyelenggaraan Pelatihan Kerja Kelurahan Padaelo (Kegiatan)</p>	<p>1</p>	<p>5.000.000</p>	<p>pengelolaan Kegiatan Pelayanan Pendidikan dan Kebudayaan; Penyelenggaraan Pelatihan Kerja Kelurahan Padaelo</p>	<p>Kecamatan</p>	<p>Jumlah Pengelolaan Kegiatan Pelayanan Pendidikan dan Kebudayaan; Penyelenggaraan Pelatihan Kerja Kelurahan Padaelo (Kegiatan)</p>	<p>1</p>	<p>4.500.000</p>	
<p>pengelolaan Kegiatan Pengembangan Usaha Mikro, Kecil dan Menengah; Kegiatan Pengelolaan Pengembangan Usaha Mikro, Kecil dan Menengah Lainnya Kelurahan Padaelo.</p>	<p>Kecamatan</p>	<p>Jumlah Pengelolaan Kegiatan Pengembangan Usaha Mikro, Kecil dan Menengah; Kegiatan Pengelolaan Pengembangan Usaha Mikro, Kecil dan Menengah Lainnya Kelurahan Padaelo (Kegiatan)</p>	<p>0</p>	<p>0</p>	<p>pengelolaan Kegiatan Pengembangan Usaha Mikro, Kecil dan Menengah; Kegiatan Pengelolaan Pengembangan Usaha Mikro, Kecil dan Menengah Lainnya Kelurahan Padaelo</p>	<p>Kecamatan</p>	<p>Jumlah Pengelolaan Kegiatan Pengembangan Usaha Mikro, Kecil dan Menengah; Kegiatan Pengelolaan Pengembangan Usaha Mikro, Kecil dan Menengah Lainnya Kelurahan Padaelo (Kegiatan)</p>	<p>0</p>	<p>0</p>	

**Tabel T-C.31.**  
Review terhadap Rancangan Awal RKPD tahun 2021  
Provinsi Sulawesi Selatan Kabupaten Bone

Nama Perangkat Daerah: Kantor Camat

PERMENDAGRI 90

Rancangan Awal RKPD						Hasil Analisis Kebutuhan					
No	Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator kinerja	Target capaian	Pagu indikatif (Rp.000)	Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator kinerja	Target capaian	Kebutuhan Dana (Rp.000)	Catatan Penting
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
	<b>UNSURKEWILAYAHAN KECAMATAN</b>										
1	<b>PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA</b>		<b>Cakupan Realisasi Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (%)</b>			<b>PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA</b>		<b>Cakupan Realisasi Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (%)</b>			
	<i>Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah</i>		<i>Jumlah Realisasi Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah</i>			<i>Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah</i>		<i>Jumlah Realisasi Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah</i>			
	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Kecamatan	Jumlah Dokumen Perencanaan Kinerja Perangkat Daerah yang Tersusun (Dokumen)	17	2,439,700	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Kecamatan	Jumlah Dokumen Perencanaan Kinerja Perangkat Daerah yang Tersusun (Dokumen)	17	2.439.700	

	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen <b>RKA-SKPD</b>	Kecamatan	Jumlah Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA - SKPD yang Tersusun (Dokumen)	1	3.600.000	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen <b>RKA-SKPD</b>	Kecamatan	Jumlah Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD yang Tersusun (Dokumen)	1	1.362.250
	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan <b>RKA-SKPD</b>	Kecamatan	Jumlah Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD yang Tersusun (Dokumen)	1	3.600.000	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Kecamatan	Jumlah Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD yang Tersusun (Dokumen)	0	0
	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Kecamatan	Jumlah Dokumen Pelaporan Capaian Kinerja Yang Tersusun dan dilaporkan sesuai kewajiban perangkat daerah (Dokumen)	7	3.500.000	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Kecamatan	Jumlah Dokumen Pelaporan Capaian Kinerja Yang Tersusun dan dilaporkan sesuai kewajiban perangkat daerah (Dokumen)	0	0
	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Kecamatan	Jumlah Dokumen Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah yang tersusun (Dokumen)	1	3.600.000	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Kecamatan	Jumlah Dokumen Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah yang tersusun (Dokumen)	0	0
	<b>Administrasi Keuangan Perangkat Daerah</b>		<b>Jumlah Administrasi Keuangan Perangkat Daerah</b>			<b>Administrasi Keuangan Perangkat Daerah</b>		<b>Jumlah Administrasi Keuangan Perangkat Daerah</b>		
	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Kecamatan	Jumlah Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	12	8.177.411.819	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Kecamatan	Jumlah Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	12	17.869.734.596

<b>Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah</b>			<b>Jumlah Kegiatan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah</b>			<b>Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah</b>			<b>Jumlah Kegiatan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah</b>		
	Peningkatan Sarana dan Prasarana Disiplin Pegawai	Kecarnatan	Persentase Peningkatan Sarana dan Prasarana Disiplin Pegawai (Pasang)	30	7.500.000	Peningkatan Sarana dan Prasarana Disiplin Pegawai	Kecarnatan	Persentase Peningkatan Sarana dan Prasarana Disiplin Pegawai (Pasang)	30	12.000.000	
	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	Kecarnatan	Jumlah Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya (Pasang)	20	5.000.000	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	Kecarnatan	Jumlah Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya (Pasang)	25	24.150.000	
<b>Administrasi Umum Perangkat Daerah</b>			<b>Jumlah Administrasi Umum Perangkat Daerah yang Terlaksana</b>			<b>Administrasi Umum Perangkat Daerah</b>			<b>Jumlah Administrasi Umum Perangkat Daerah yang Terlaksana</b>		
	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Kecarnatan	Jumlah Paket Penyediaan Alat Tulis Kantor (ATK) penunjang administrasi perkantoran sesuai rencana kebutuhan (Paket)	60	30.500.000	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Kecarnatan	Jumlah Paket Penyediaan Alat Tulis Kantor (ATK) penunjang administrasi perkantoran sesuai rencana kebutuhan (Paket)	84	50.562.350	

Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Kecamatan	Jumlah Paket Penyediaan Logistik Kantor (Paket)	12	44.049.000	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Kecamatan	Jumlah Paket Penyediaan Logistik Kantor (Paket)	12	33.775.550
Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Kecamatan	Jumlah Paket Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan (Paket)	12	10.520.000	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Kecamatan	Jumlah Paket Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan (Paket)	2	5.100.000
Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Kecamatan	Jumlah Pembayaran Media yang menyediakan Bahan Bacaan (Kali)	12	3.600.000	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Kecamatan	Jumlah Pembayaran Media yang menyediakan Bahan Bacaan (Kali)	24	2.400.000
Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Kecamatan	Jumlah Kegiatan Rutin Koordinasi dan Konsultasi Pelaksanaan Tugas Organisasi yang diikuti (Kegiatan)	218	126.971.350	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Kecamatan	Jumlah Kegiatan Rutin Koordinasi dan Konsultasi Pelaksanaan Tugas Organisasi yang diikuti (Kegiatan)	218	36.000.000

<b>Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah</b>		<b>Jumlah Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah</b>			<b>Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah</b>			<b>Jumlah Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah</b>	
	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan Kecamatan	Jumlah Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan (Unit)	0	0	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan Kecamatan			Jumlah Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan (Unit)	0
	Pengadaan Mebel Kecamatan	Jumlah Pengadaan Mebel (Paket)	3	26.000.000	Pengadaan Mebel Kecamatan			Jumlah Pengadaan Mebel (Paket)	4
	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya Kecamatan	Jumlah Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya (Paket)	4	13.270.000	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya Kecamatan			Jumlah Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya (Paket)	4
<b>Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>		<b>Jumlah Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>			<b>Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>			<b>Jumlah Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>	

	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Kecamatan	Jumlah Rekening Listrik, Wifi dan Air yang Terbayarkan (Rekening)	36	31.465.445	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Kecamatan	Jumlah Rekening Listrik, Wifi dan Air yang Terbayarkan (Rekening)	36	28.050.000
	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Kecamatan	Jumlah Tenaga Administrasi yang Mendapatkan Jasa Pelayanan Umum Kantor Selama Setahun (Kali)	108	58.196.160	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Kecamatan	Jumlah Tenaga Administrasi yang Mendapatkan Jasa Pelayanan Umum Kantor Selama Setahun (Kali)	60	59.750.400
	<b>Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>		<b>Jumlah Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>			<b>Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>		<b>Jumlah Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>		
	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Kecamatan	Jumlah Pemeliharaan Kendaraan Dinas Operasional (Unit)	48	85.111.400	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Kecamatan	Jumlah Pemeliharaan Kendaraan Dinas Operasional (Unit)	3	55.440.000

	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Kecamatan	Jumlah Gedung Kantor Dan Bangunan Lainnya (Paket)	12	18.951.625	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Kecamatan	Jumlah Gedung Kantor Dan Bangunan Lainnya (Paket)	12	18.920.000
2	<b>PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK</b>		<b>Cakupan Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik (%)</b>			<b>PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK</b>		<b>Cakupan Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik(%)</b>		
	<i>Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan</i>		<i>Jumlah Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan</i>			<i>Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan</i>		<i>Jumlah Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan</i>		
	Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait	Kecamatan	Jumlah Kegiatan Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait (Kegiatan)	1	27.769.000	Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait	Kecamatan	Jumlah Kegiatan Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait (Kegiatan)	18	19.250.500
3	<b>PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN</b>		<b>Cakupan Pelaksanaan Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan (%)</b>			<b>PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN</b>		<b>Cakupan Pelaksanaan Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan (%)</b>		

	Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa		Jumlah Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa			Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa		Jumlah Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa		
	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat diWilayah Kecamatan	Kecamatan	Jumlah Dokumen Evaluasi Pelaksanaan FKKS dan TKSK (Dokumen)	2	52.756.000	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Kecamatan	Jumlah Dokumen Evaluasi Pelaksanaan FKKS dan TKSK (Dokumen)	3	15.000.000
	Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan		Jumlah Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan yang Terlaksana			Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan		Jumlah Pemberdayaan Kelurahan yang Terlaksana		
	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	Kecamatan	Jumlah Pembangunan Sarana dan Prasarana diKelurahan (Kegiatan)	2	490.000.000	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	Kecamatan	Jumlah Pembangunan Sarana dan Prasarana diKelurahan (Kegiatan)	4	220.807.400
	Pemberdayaan Masyarakat diKelurahan	Kecamatan	Jumlah Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat diKelurahan (Kegiatan)	2	6.000.000	Pemberdayaan Masyarakat diKelurahan	Kecamatan	Jumlah Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat diKelurahan (Kegiatan)	12	24.192.600
4	PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM		Cakupan Pelaksanaan Koordinasi Ketentraman dan Ketertiban Umum (%)			PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM		Cakupan Pelaksanaan Koordinasi Ketentraman dan Ketertiban Umum (%)		

	<b>Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum</b>	<b>Jumlah Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum</b>			<b>Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum</b>			<b>Jumlah Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum</b>		
	Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	Kecamatan	Jumlah Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan (Kali)	12	27.000.000	Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	Kecamatan	Jumlah Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan (Kali)	12	27.000.000
5	<b>PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA</b>		<b>Cakupan Pelaksanaan Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa (%)</b>			<b>PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA</b>		<b>Cakupan Pelaksanaan Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa (%)</b>		
	<b>Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa</b>		<b>Jumlah Realisasi Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa</b>			<b>Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa</b>		<b>Jumlah Realisasi Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa</b>		
	Fasilitasi Penyusunan Peraturan Desa dan Peraturan Kepala Desa	Kecamatan	Jumlah Realisasi Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	12	3.960.000	Fasilitasi Penyusunan Peraturan Desa dan Peraturan Kepala Desa	Kecamatan	Jumlah Realisasi Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	0	0
	Koordinasi Pendampingan Desa di Wilayahnya	Kecamatan	Jumlah Laporan Hasil Monitoring dan Evaluasi Pengelolaan Dana Desa (Laporan)	12	6.050.000	Koordinasi Pendampingan Desa di Wilayahnya	Kecamatan	Hasil Monitoring dan Evaluasi Pengelolaan Dana Desa (Laporan)	1	25.500.000

## 2.5 Penelaahan Usulan Program dan kegiatan Masyarakat

1. Bahwa Usulan Program / Kegiatan yang dibahas di dalam Musrenbang mekanismenya diawali dari penggalan gagasan dari tingkat Dusun / Lingkungan melibatkan unsur Tokoh Masyarakat, Tokoh Pemuda, Unsur Perempuan dan Organisasi Kemasyarakatan, sehingga menghasilkan usulan program yang dibawa ke forum Musrenbangdes.
2. Di Forum Musrenbangdes menghasilkan skala prioritas usulan tingkat Desa selanjutnya ditunjuk perwakilan dari Desa untuk mengawal usulan tersebut di Forum Musrenbang Tingkat Kecamatan.
3. Hasil Musrenbang Kecamatan merupakan Skala prioritas program yang telah sesuai dengan kebutuhan real masyarakat serta isu - isu penting dari masing masing SKPD yang ada pada Unit Pelaksana Teknis ditingkat Kecamatan.

Pemerintah Kecamatan dalam pelaksanaan pembangunan menggunakan suatu model yang disebut Sistem Manajemen Pembangunan Partisipatif (SMPP) yang bermakna bahwa ide pembangunan tidak dari pemerintah kepada masyarakat (Top Down ) tetapi juga mendorong partisipasi masyarakat untuk memberikan usulan – usulan pembangunan kepada Pemerintah (Bottom Up) dalam wadah kegiatan Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) mulai dari tingkat Desa/Kelurahan, Kecamatan hingga tingkat kabupaten.

BAB III

TUJUAN, SASARAN, PROGRAM DAN KEGIATAN

3.1 Telaahan terhadap Kebijakan Nasional dan Provinsi

Sebagai suatu keharusan bagi setiap Perangkat Daerah untuk menetapkan tujuan sasaran danprogram kegiatan, maka dari itu perludiukur kinerja dari setiap Perangkat Daerah termasuk untukdapat mengimplementasikan kebijakan-kebijakan Pemerintah baik Tingkat Kata, Provinsi maupunKebijakanNasional.

Penentuan prioritas dan sasaran pembangunan nasional Tahun 2021 tertuang dalam RencanaKerja Pemerintah Kabupaten Bone sesuai tema Tahun 2021 adalah **"Penguatan Kapasitas Daerah Dalam Meningkatkan Investasi Yang KondusifMenuju Sustainable Development"**.

Adapun Prioritas Nasional, Propinsi Sulawesi Selatan dan Kabupaten Bone terkait dengan prioritas pembangunan Daerah Kabupaten Bone Tahun2021 disajikan dalam table berikut ini:

No	Nasional	SulawesiSelatan	KabupatenBone
1	Rancangan Teknokratik RPJMD2020-2024	Perbaikan tata kelola pemerintahan dan pelayanan public	Peningkatan tata kelola pemerintahan untuk mendukung Pelayanan public yang berkualitas
2		Penguatan infrastruktur wilayah	Pengembangan ekonomi antara hidup masyarakat
3		Pengembangan Kawasan pusat pertumbuhan	Peningkatan pelayanan Pendidikan, kesehatan, dan sosial Dasar lainnya
4		Penurunan kesenjangan social ekonomi	Percepatan pembangunan daerah yang bertumpu pada desa dan Kawasan perdesaan
5		Pembangunan Manusia	Pengembangan inovasi daerah untuk mendukung pembangunan Daerah dan pelayanan publik
6		Pemberdayaan ekonomi kerakyatan melalui hilirisasi komoditas	Penciptaan iklim investasi yang kondusif untuk mendorong Pengembangan usaha
7		Pelestarian lingkungan hidup	Stabilitas keamanan, ketertiban, ketentraman dalam kemajemukan masyarakat

Tabel diatas menunjukkan adanya sinkronisasi kebijakan nasional dan provinsi dengan arah kebijakan dan program Kabupaten Bone.

### 3.2 Tujuan dan Sasaran Renja SKPD

Perumusan dan tujuan dan sasaran didasarkan atas rumusan isu-isu penting penyelenggaraan tugas dan fungsi SKPD kecamatan yang dikaitkan dengan sasaran target kinerja renstra Kecamatan 2020-2023.

Dengan menitik beratkan pada Visi dan Misi yang telah ditetapkan Rencana Strategis maka kecamatan mempunyai *tujuan*:

1. Meningkatkan kompetensi sumberdaya manusia dibidang pelayanan
2. Meningkatkan sarana dan prasarana yang berbasis ilmu teknologi
3. Meningkatkan tertib administrasi utama bidang pelayanan

Dengan *sasaran* sebagai berikut:

1. Meningkatkan pengetahuan dan keterampilan dibidang pelayanan
2. Tersedianya sarana dan prasarana pendukung yang berbasis teknologi
3. Meningkatkan keefapan dan kecepatan dalam memberikan pelayanan kepada warga masyarakat
4. Meningkatkan kesejahteraan masyarakat dalam kehidupan masyarakat.

### 3.3 Program dan Kegiatan

- a. Faktor-faktor yang menjadi bahan pertimbangan terhadap rumusan program dan kegiatan Kecamatan 2021

Dalam merumuskan program kegiatan, Kecamatan mempertimbangkan beberapa faktor penting. Faktor-faktor yang menjadi bahan pertimbangan terhadap perumusan program dan kegiatan antara lain:

1. Pencapaian visi dan misi Kepala Daerah,
  2. Pencapaian SDGs;
  3. Pengentasan kemiskinan,
  4. Pencapaian NSPK dan SPM,
  5. Pendayagunaan potensi ekonomi daerah,
  6. Pengembangan daerah terisolir.
- b. Uraian garis besar mengenai rekapitulasi program dan kegiatan Dengan memperhatikan arah pembangunan daerah Kabupaten Bone pada Tahun 2021, maka Kecamatan merumuskan Rancangan Awal Rencana Kerja Tahun 2021 yang terdiri dari 5 Program, 12 Kegiatan, dan 27 Sub Kegiatan. Adapun Program, Kegiatan, dan Sub Kejadiannya yang tersebut sebagai berikut:

## **1. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah kabupaten/Kota**

### **□ Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah**

1. Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah
2. Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD
3. Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD
4. Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD
5. Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah

### **□ Administrasi Keuangan Perangkat Daerah**

1. Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN

### **□ Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah**

1. Peningkatan Sarana dan Prasarana Disiplin Pegawai
2. Pengadaan Pakaian Dinas beserta atribut kelengkapannya

### **□ Administrasi Umum Perangkat Daerah**

1. Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor
2. Penyediaan Bahan Logistik Kantor
3. Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan
4. Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan
5. Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD

### **□ Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah**

1. Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan
2. Pengadaan Mebel
3. Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya

### **□ Pengadaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**

1. Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik
2. Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor

### **□ Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**

1. Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan
2. Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya

## **2. Program Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik**

### **□ Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan**

1. Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait

### **3. Program Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan**

#### **□ Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa**

1. Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat, di Wilayah Kecamatan

#### **□ Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan**

1. Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan
2. Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan

### **4. Program Koordinasi Ketentraman dan Ketertiban Umum**

#### **□ Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketentraman dan Ketertiban Umum**

1. Sinergitas dengan Kepolisian, Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia, dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan

### **5. Program Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa**

#### **□ Fasilitas, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa**

1. Fasilitas Penyusunan, Peraturan Desa dan Peraturan Kepala Desa
2. Koordinasi Pendampingan Desa di Wilayahnya

## **BAB IV**

### **RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH**

Rencana Kerja (RENJA) merupakan acuan setiap perangkat daerah dalam mengoperasionalkan program dan kegiatan sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya dalam rangka mencapai visi jangka menengah daerah. Dengan rencana kerja yang terukur dan didukung oleh pendanaan, maka menjadi suatu instrumen dan indikator yang digunakan dalam upaya mewujudkan pembangunan daerah agar lebih terarah. Penyusunan RENJA berpedoman pada Renstra Kecamatan dan mengacu pada Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kabupaten Bone.

Penyusunan RENJA bukanlah kegiatan yang berdiri sendiri, melainkan merupakan rangkaian kegiatan yang simultan dengan penyusunan RKPD, serta merupakan bagian dari rangkaian kegiatan penyusunan APBD. Rencana Kerja Kecamatan merupakan bagian yang utuh dari Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) dan Rencana Strategis (RENSTRA) Kecamatan. Keduanya merupakan penjabaran dari Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004, tentang system perencanaan pembangunan nasional dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 28 tahun 2009 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 23 Tahun 2007 tentang Pedoman tata cara pengawasan penyelenggaraan pemerintahan daerah, dengan demikian program dan kegiatan pembangunan yang ada pada dokumen perencanaan diatur secara rinci dalam Rencana Kerja (RENJA).

Rumusan Rencana Kerja dan pendanaan Perangkat daerah Tahun 2021 sebagaimana tercantum dalam table berikut ini:

PEMERINTAH KABUPATEN BONE  
RUMUSAN RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN TAHUN 2021  
DAN PRAKIRAAN MAJU TAHUN 2022

SKPD : 1200905--KECAMATAN MARE

PERMENDAGRI 13

KODE	URUSAN/BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH DAN PROGRAM/KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM/KEGIATAN	RENCANA TAHUN 2021				CATATAN PENTING	RENCANA TAHUN 2022	
			LOKASI	CAPAIAN KINERJA	KEBUTUHAN DANA/ PAGU INDIKATIF	SUMBER DANA		CAPAIAN KINERJA	KEBUTUHAN DANA/ PAGU INDIKATIF
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
1	URUSAN WAJIB				1.026.756.000,00				1.246.736.335,00
1.20	OTONOMI DAERAH, PEMERINTAHAN UMUM, ADMINISTRASI KEUANGAN DAERAH, PERANGKAT DAERAH, KEPEGAWAIAN DAN PERSANDIAAN				1.026.756.000,00				1.246.736.335,00
1.20.01	Program Pelayanan Administrasi Pemerintahan	Cakupan Ketersediaan Pelayanan Administrasi Pemerintahan		100%	199.340.000,00			100%	222.198.500,00
1.20.01.02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah rekening listrik dan telepon/Wifi	Kecamatan Mare	80 Rekening	20.800.000,00	DAU		Rekening	20.800.000,00
1.20.01.03	Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan	Jumlah sarana yang dibutuhkan untuk kegiatan administrasi keuangan seluruh	Kecamatan Mare	800 Sarana	20.800.000,00	DAU		800 Sarana	20.800.000,00
1.20.01.04	Penyediaan Sarana Ekspedisi dan Perhubungan	Jumlah pembayaran modal yang dibutuhkan untuk kegiatan	Kecamatan Mare	24 Bus	20.800.000,00	DAU		Bus	20.800.000,00
1.20.01.05	Saluran Irigasi dan Sarana Pengairan dan Dredging	Jumlah kegiatan yang dibutuhkan untuk kegiatan irigasi dan pengairan yang irigasi	Kecamatan Mare	100 Kegiatan	20.800.000,00	DAU		100 Kegiatan	20.800.000,00
1.20.01.06	Penyediaan Administrasi Pemerintahan	Jumlah aset pendukung kegiatan administrasi pemerintahan	Kecamatan Mare	80 Aset	20.800.000,00	DAU		80 Aset	20.800.000,00
1.20.02	Program Pembinaan Sarana dan Prasarana Aparatur	Cakupan pelayanan sarana dan prasarana aparatur		100%	184.876.000,00			100%	198.990.335,00

KODE	URAIAN RENCANA KEGIATAN PEMERINTAHAN DAERAH DAN PROGRAM KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM/KEGIATAN	LOKASI	RENCANA TAHUN 2017			SASARAN BENTUK	RENCANA TAHUN 2017	
				INDIKATOR KINERJA	RENCANA PAGU INDIKATIF	SUMBER DANA		INDIKATOR KINERJA	RENCANA PAGU INDIKATIF
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
20-02-07	Pengadaan "Peningkatan Gedung Kantor	Jumlah pengadaan peningkatan Gedung Kantor	Kecamatan Mare	3 Paket	33.000.000,00	DAU		3 Paket	33.000.000,00
20-02-09	Pengadaan Peralatan Gedung Kantor	Jumlah pengadaan peralatan Gedung Kantor	Kecamatan Mare	3 Unit	33.000.000,00	DAU		3 Unit	33.000.000,00
20-02-10	Pengadaan Meubeler	Jumlah pengadaan meubeler	Kecamatan mare	4 Paket	26.620.000,00	DAU		4 Paket	26.620.000,00
20-02-22	Pemeliharaan Rutin berkala Gedung Kantor	Jumlah pemeliharaan gedung kantor	Kecamatan Mare	12 Kegiatan	20.570.000,00	DAU		12 Kegiatan	20.570.000,00
20-02-24	Pemeliharaan Rutin berkala Kendaraan Dinas/Operasional	Jumlah pemeliharaan Kendaraan Dinas/Operasional	Kecamatan Mare	60 Kegiatan	55.200.335,00	DAU		Kegiatan	55.200.335,00
20-02	Program Peningkatan Kualitas Aparatur	Cakupan pelatihan peningkatan kompetensi aparatur		100%	18.372.800,00			100%	18.372.800,00
20-02-01	Pengadaan Pakaian Kerja Harian Aparatur	Jumlah pengadaan Pakaian Kerja Harian Aparatur	Kecamatan Mare	30 Pakaian	3.400.000,00	DAU		30 Pakaian	3.400.000,00
20-02-02	Pengadaan Pakaian Kerja Harian Aparatur	Jumlah pengadaan Pakaian Kerja Harian Aparatur	Kecamatan Mare	30 Pakaian	3.400.000,00	DAU		30 Pakaian	3.400.000,00
20-08	Program Peningkatan Pemeliharaan Umum	Cakupan realisasi kegiatan pemeliharaan Pemeliharaan Umum		100%	22.130.000,00			100%	22.130.000,00
20-08-01	Penyusunan Rencana Perawatan Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan dan penganggaran Kecamatan yang tersusun	Kecamatan Mare	7 Dokumen	22.130.000,00	DAU		8 Dokumen	22.130.000,00
20-08-02	Program Pembinaan Dan Fasilitas Pengelolaan Keuangan Desa	Cakupan peningkatan pembinaan dan fasilitas pengelolaan Dana Desa		100%	4.520.000,00			100%	4.520.000,00
20-08-03	Evaluasi Rancangan Peraturan Desa Tentang AD/Desa	Jumlah Laporan hasil evaluasi Rancangan Peraturan Desa	Kecamatan mare	1 Laporan	4.520.000,00	DAU		1 Laporan	4.520.000,00
20-08-04	Program Pembinaan Dan Fasilitas Pengelolaan Keuangan Desa	Cakupan peningkatan pembinaan dan fasilitas pengelolaan Dana Desa		100%	2.643.000,00			100%	2.643.000,00

KODE	URUSAN/BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH DAN PROGRAM/KEGIATAN			INDIKATOR KINERJA PROGRAM/KEGIATAN	RENCANA TAHUN 2021				CATATAN PENTING	RENCANA TAHUN 2022	
					LOKASI	TARGET CAPAIAN KINERJA	EBUTUHAN DANA/ PAGU INDIKATIF	SUMBER DANA		TARGET CAPAIAN KINERJA	EBUTUHAN DANA/ PAGU INDIKATIF
(1)	(2)			(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
I 20 20 07	Koordinasi Pengawasan Yang Lebih Komprehensif			Jumlah Operasional Pengawasan Tripika	Kecamatan Mare	36 Kali	27.000.000,00	DAU		36 Kali	32.650.000,00
I 20 31	Program Peningkatan Kualitas Penyelenggaraan Pemerintahan Desa/Keturahan			Persentase peningkatan kualitas penyelenggaraan pemerintah Desa/Kelurahan		100%	170.450.000,00			100%	200.255.000,00
I 20 31 01	Pembinaan dan Evaluasi Pelaksanaan Pemerintahan, Kecamatan dan Kelurahan			Jumlah Dokumen Evaluasi Pelaksanaan FKKS dan TKSK	Kecamatan Mare	3 Dokumen	54.450.000,00	DAU		Dokumen	59.895.000,00
I 20 31 42	Peningkatan Operasional Kelurahan Padaelo			Jumlah Operasional Kelurahan Padaelo	Kelurahan Padaelo	12 Kegiatan	116.000.000,00	DAU		12 Kegiatan	140.360.000,00
I 20 80	Program Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan			Cakupan Realisasi Pembangunan sarana dan Prasarana Kelurahan		100 %	385.250.000,00			100 %	443.108.100,00
I 20 80 648	Pengadaan, Pembangunan, Pengembangan dan Pemeliharaan Sarana Dan Prasarana Lingkungan Pemukiman Drainase dan Selokan Kelurahan Padaelo			Jumlah pengadaan pembangunan, pengembangan dan pemeliharaan sarana dan prasarana lingkungan pemukiman drainase dan selokan	Kelurahan Padaelo	1 Kegiatan	112.750.000,00	DAU		Kegiatan	124.025.000,00
I 20 80 649	Pengadaan, Pembangunan, Pengembangan dan Pemeliharaan Sarana Dan Prasarana Lingkungan Pemukiman Sarana Pengumpulan Sampah dan Sarana Pengolahan Sampah Kelurahan Padaelo			Jumlah pengadaan pembangunan, pengembangan dan pemeliharaan sarana dan prasarana lingkungan pemukiman sarana pengumpulan sampah dan sarana pengolahan sampah kelurahan padaelo	Kelurahan Padaelo	1 Kegiatan	22.500.000,00	DAU		1 Kegiatan	25.410.000,00
I 20 80 656	Pengadaan, Pembangunan, Pengembangan dan Pemeliharaan Sarana Prasarana Transportasi Jalan Pemukiman Kelurahan Padaelo			Jumlah pengadaan, Pembangunan, Pengembangan dan Pemeliharaan Sarana Prasarana Transportasi Jalan pemukiman Kelurahan Padaelo	Mare	1 Paket	200.000.000,00	DAU		Paket	243.673.100,00

DAN PRAKIRAAN MAJU TAHUN 2022

SKPD : 7-01.0-0.0-0.05 KECAMATAN MARE

**PERMENDAGRI 90**[illegible]

KODE	URUSAN/BIDANG/URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH DAN PROGRAM/KEGIATAN/ SUB-KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM/KEGIATAN	RENCANA TAHUN 2021				DATA TAMBAHAN PENTING	RENCANA TAHUN 2022	
			LOKASI	TARGET CAPAIAN KINERJA	KEBUTUHAN DANA PAGU INDIKATIF	SUMBER DANA		TARGET CAPAIAN KINERJA	KEBUTUHAN DANA PAGU INDIKATIF
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
		Jumlah Pasang Pengadaan Pakaian Hari-Hari tertentu sesuai Rencana Kebutuhan		30 Pasang				33 Pasang	
1.91.01.206	Administrasi Umum Berangkat Daerah				42.842.980,00				46.517.240,00
1.91.01.206.04	Persediaan Bahan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Penyediaan Aksi Penyediaan Administrasi Kantor yang sesuai dengan Rencana	Kecamatan Mare	14 Paket	88.920.000,00	DANA UMUM Dana Transfer Umum Dana Alokasi Umum		14 Paket	88.920.000,00
1.91.01.206.04	Persediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Penyediaan Makan dan Minum Harian Pegawai dan Tamu sesuai rencana	Kecamatan Mare	12 Paket	99.77.6999,00	DANA UMUM Dana Transfer Umum Dana Alokasi Umum		12 Paket	97.159.159,99
1.91.01.206.05	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Paket Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan Perangkat Administrasi Pemerintahan sesuai Rencana Kebutuhan	Kecamatan Mare	2 Paket	5.200.000,00	DANA UMUM Dana Transfer Umum Dana Alokasi Umum		3 Paket	5.200.000,00
1.91.01.206.06	Penyediaan Bahan Baku dan Bahan untuk Pembuatan Bahan Baku	Jumlah Pembelian Modal untuk pembelian Bahan Baku	Kecamatan Mare	12 Paket	2.490.000,00	DANA UMUM Dana Transfer Umum Dana Alokasi Umum		5 Paket	2.640.000,00
1.91.01.206.09	Pembelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Kegiatan Rapat Rapat Koordinasi dan Konsultasi ke luar Daerah yang diikuti oleh Aparat Perangkat Daerah	Kecamatan Mare	12/12 Orang/Hari	360.000,00	DANA UMUM Dana Transfer Umum Dana Alokasi Umum		12/12 Orang/Hari	360.000,00
1.91.01.207	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah				116.337.089,00				127.970.796,00
1.91.01.207.05	Pengadaan Mebel	Jumlah Pengadaan Mebelur	Kecamatan Mare	4 Paket	80.130.970,00	DANA UMUM Dana Transfer Umum Dana Alokasi Umum		4 Paket	68.444.067,00
1.91.01.207.06	Pengadaan Perlengkapan Mesin Lainnya	Jumlah Pengadaan Perlengkapan Mesin lainnya sesuai Rencana Kebutuhan	Kecamatan Mare	1 Paket	38.206.119,00	DANA UMUM Dana Transfer Umum Dana Alokasi Umum		1 Paket	39.526.731,00

				URUSAN BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH DAN PROGRAM/KEGIATAN SUB-KEGIATAN	INDUKTOR KINERJA PROGRAM/KEGIATAN	RENCANA TAHUN 2021			CATATAN PENTING	RENCANA TAHUN 2022		
KODE						LOKASI	TARGET CAPAIAN KINERJA	KEBUTUHAN DANA PAGU INDIKATIF		SUMBER DANA	TARGET CAPAIAN KINERJA	KEBUTUHAN DANA PAGU INDIKATIF
(1)				(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
74	01	01	2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah				87.800.400,00				96.580.440,00
74	01	01	2.08	02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya, dan Listrik	Jumlah Paket Pembayaran Jasa Komunikasi Bulanan (Telepon/faksimile/Internet dan TV) sesuai Rencana Kebijakan	Kecamatan Mare	38 Rekening	28.650.000,00	[DANA UMUM], Dana Transfer Umum, Dana Alokasi Umum	38 Rekening	30.855.000,00
74	01	01	2.08	04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kecamatan	Jumlah Tenaga yang mendukung Jasa Administrasi, Keuangan selama setahun	Kecamatan Mare	60 Orang/Bulan	89.750.400,00	[DANA UMUM], Dana Transfer Umum, Dana Alokasi Umum	60 Orang/Bulan	65.725.440,00
74	01	01	2.08		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah			74.360.000,00				81.798.000,00
74	01	01	2.09	01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan, Perorangan, Dinas, atau Kendaraan Dinas, dan lain-lain	Jumlah Pemeliharaan Kendaraan Dinas, Operasional	Kecamatan Mare	3 Unit	65.440.000,00	[DANA UMUM], Dana Transfer Umum, Dana Alokasi Umum	4 Unit	60.984.000,00
74	01	01	2.09	02	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Gedung Labung	Jumlah Pemeliharaan Gedung Kantor dan Gedung Labung sesuai Rencana	Kecamatan Mare	12 Bulan	16.220.000,00	[DANA UMUM], Dana Transfer Umum, Dana Alokasi Umum	12 Bulan	30.612.000,00
74	01	02		PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK				19.250.500,00				21.475.650,00
74	01	02	2.01	Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di tingkat Kecamatan				19.250.500,00				21.475.650,00
74	01	02	2.01	01	Koordinasi, Supervisi, Perencanaan, dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait	Jumlah Dokumen Perencanaan Kinerja Kecamatan yang tersusun	Kecamatan Mare	12 Dokumen	19.250.500,00	[DANA UMUM], Dana Transfer Umum, Dana Alokasi Umum	12 Dokumen	21.475.650,00
74	01	03		PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN				260.000.000,00				67.400.674,00

KODE				DAIRAH/BIKING/DESA/ PEMERINTAHAN DAERAH DAN PROGRAM/KEGIATAN/ SUB-KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM/KEGIATAN	REKONSTRUKSI 2021			REKONSTRUKSI 2022			
						LOKASI	TARGET CAPAIAN KINERJA	KEBUTUHAN DANA PAGU INDIKATIF	SUMBER DANA	SALINAN PENTING	TARGET CAPAIAN KINERJA	KEBUTUHAN DANA PAGU INDIKATIF
(1)				(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
7	01	03	2.01	Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa				15.000.000,00				16.600.000,00
7	01	03	2.01.03	Peningkatan Efektivitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Jumlah Dokumentasi Evaluasi pelaksanaan PKKS dan TKSK	Kecamatan Mare	5 Dokumen	15.000.000,00	DANA UMUM - Dana Transfer Umum - Dana Alokasi Umum		4 Dokumen	16.600.000,00
7	01	03	2.02	Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan				245.000.000,00				59.000.674,00
7	01	03	2.02.02	Pengamanan Sarana dan Prasarana Kelurahan	Jumlah pembangunan sarana dan prasarana Kelurahan sederajat	Kelurahan Pabelan	1 Kegiatan	220.007.200,00	DANA UMUM - Dana Transfer Umum - Dana Alokasi Umum		1 Kegiatan	220.007.200,00
7	01	03	2.02.09	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Jumlah kegiatan pemberdayaan Masyarakat Kelurahan	Kelurahan Selaolo	12 Kegiatan	21.499.000,00	DANA UMUM - Dana Transfer Umum - Dana Alokasi Umum		12 Kegiatan	26.611.669,00
7	03	04		PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM				27.000.000,00				29.700.000,00
7	01	04	2.04	Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketentraman dan Ketertiban Umum				27.000.000,00				29.700.000,00
7	01	05	2.05	Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Kepolisian Provinsi Jawa Tengah, Kepolisian Kabupaten Semarang dan Masyarakat Kecamatan	Jumlah Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Kepolisian Provinsi Jawa Tengah, Kepolisian Kabupaten Semarang dan Masyarakat Kecamatan	Kecamatan Mare	60 Kegiatan	25.000.000,00	DANA UMUM - Dana Transfer Umum - Dana Alokasi Umum		60 Kegiatan	25.000.000,00
7	01	06		PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA				25.500.000,00				28.050.000,00
7	01	06	2.01	Facilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi, Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa				25.500.000,00				28.050.000,00

KODE					UR USAN/BIDANG UR USAN PEMERINTAHAN DAERAH DAN PROGRAM/KEGIATAN/ SUB-KEGIATAN	INDIKATOR KINER.LA PROGRAM/KEGIATAN	RENCANA TAHUN 2021				CATATAN PENTING	RENCANA TAHUN 2022	
							LOKASI	TARGET CAPAIAN KINER.LA	KEBUTUHAN DANA/ PAGU INDIKA TIF	SUMBERDANA		TARGET CAPAIAN KINER.LA	KEBUTUHAN DANA/ PAGU INDIKA TIF
(1)					(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
7	01	06	2.01	17	Koordinasi Pendampingan Desa di Wilayahnya	Jumlah Laporan hasil Evaluasi Rancangan peraturan desa	Kecamatan Mare	Tahun	25500.000 .00	[DANA UMUM]- Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		I Tah un	28.050.000.00

Jul 2021  
CAMAT MARE  
A. MUHAMMAD ALUDDIN, S.STP  
Pangkat Pembina  
Nip. 19800222199912 1 001

## **BABV**

### **PENUTUP**

Rencana Kerja Perangkat Daerah Kecamatan Tahun 2021 disusun berdasarkan Visi dan Misi Kabupaten Bone yang tertuang dalam Rencana Strategis Perencanaan Daerah Kecamatan Tahun 2018 – 2023 yang dalam penyusunan program dan kegiatan diselenggarakan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Bone. Rencana Kerja Perangkat Daerah yang merupakan perencanaan program dan kegiatan satu tahun kedepan dibuat secara efektif dan partisipatif, dengan mengupayakan semaksimal mungkin dapat memfasilitasi segenap aspirasi masyarakat dan stakeholders (pihak yang terkait dan berkepentingan) di Kecamatan untuk menjamin keberhasilan program/kegiatan. Renja PD (program tahunan) yang merupakan implementasi dari Renstra Perangkat Daerah (program 5 tahunan), maka perlu dilakukan upaya sebagai berikut:

1. Pengukuran pencapaian sasaran dan target yang telah ditetapkan Rencana Kerja secara berkelanjutan untuk mengetahui tingkat keberhasilan pelaksanaan program dan kegiatan Kecamatan.
2. Pengevaluasian, pengkajian hasil pengukuran pencapaian sasaran dan target yang telah ditetapkan untuk melakukan penilaian terhadap kinerja seluruh aparatur.
3. Rencana Kerja Perangkat Daerah Kantor Kecamatan selain menjadi program/kegiatan selama tahun 2021 juga berfungsi sebagai peningkatan kinerja aparatur serta barometer untuk menjadi umpan balik untuk perencanaan pada tahun berikutnya.

Rencana program di Kecamatan tahun 2021 merupakan program pemberdayaan masyarakat serta kegiatan kerja aparatur Kecamatan pada periode Tahun 2021. Dalam pengembangannya akan disesuaikan dengan dinamika perkembangan kebutuhan masyarakat di Kecamatan yang pelaksanaannya bersifat efisien, tepat sasaran dan berdaya guna serta berhasil guna sesuai dengan Visi dan Misi Kabupaten Bone yang ditetapkan.